

DINAMIKA — DAN — KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI INDONESIA



DINAMIKA DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI INDONESIA

**Jose Beno
Noviah Dwi Putranti
Suharja
Zaimatus Sa'ida
Luluk Masruroh
Dian Milasari
Moh. Uyub
Bambang Dwi Wijayanto
Dian Erliyani
Radini Sinta
Edi Kuhen
Renza Maisetyo**

Editor : Prof. Dr. Eko Handoyo, M.Si.

DINAMIKA DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI INDONESIA

Tim Penulis:

Jose Beno
Noviah Dwi Putranti
Suharja
Zaimatus Sa'ida
Luluk Masrurroh
Dian Milasari
Moh. Uyub
Bambang Dwi Wijayanto
Dian Erliyani
Radini Sinta
Edi Kuhen
Renza Maisetyo

Editor : Prof. Dr. Eko Handoyo, M.Si.
Tata Letak : Lilis Khalisatul Karimah
Desain Cover : Asep Nugraha
Ukuran : UNESCO 15,5 x 23 cm
Halaman : ix, 229
E-ISBN : 978-634-7522-72-6 (PDF)
Terbit Pada : Juli 2026
Anggota IKAPI : No. 073/BANTEN/2023

Hak Cipta 2026 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA

Jl. Kramat, Panenjoan Kec. Carenang, Kab. Serang – Banten, 42195
Email : sadapenerbit@gmail.com
Website : sadapenerbit.com & repository.sadapenerbit.com
Telpon/WA : +62 838 1281 8431

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku yang berjudul **“Dinamika dan Kebijakan Pendidikan di Indonesia”** ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai upaya untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai perjalanan, tantangan, serta arah kebijakan pendidikan di tengah arus perubahan zaman yang semakin kompleks.

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun peradaban suatu bangsa. Di Indonesia, sistem pendidikan senantiasa mengalami dinamika yang menarik untuk dikaji, baik dari sisi historis, filosofis, maupun implementasi kebijakannya. Mulai dari perubahan kurikulum, peningkatan kualitas guru, pemerataan akses pendidikan, hingga tantangan transformasi digital, semuanya menjadi bagian dari mozaik besar pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

Buku ini disusun dengan pendekatan multidisiplin, menggabungkan analisis kebijakan, praktik di lapangan, serta perspektif teoritis yang relevan. Kami berharap buku ini tidak hanya menjadi sumber referensi akademis bagi mahasiswa, pendidik, dan praktisi pendidikan, tetapi juga menjadi bahan refleksi bagi para pengambil kebijakan dalam merumuskan langkah-langkah strategis yang lebih berpihak pada peningkatan mutu pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi kemajuan dunia pendidikan di Indonesia

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 OTONOMI DAN DESENTRALISASI PENDIDIKAN: KAJIAN KONSEPTUAL, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI DI INDONESIA ...	1
(Jose Beno)	
Pendahuluan	2
Landasan Konseptual: Otonomi dan Desentralisasi	3
Evolusi Kebijakan Desentralisasi Pendidikan di Indonesia	5
Manajemen Berbasis Sekolah Sebagai Perwujudan Otonomi	7
Tantangan dan Dilema Desentralisasi Pendidikan	9
Refleksi Kritis dan Rekomendasi	11
Kesimpulan	12
Daftar Pustaka	14
Profil Penulis	16
BAB 2 KEBIJAKAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN	18
(Noviah Dwi Putranti)	
Pendahuluan	19
Konsep dan Kebijakan Penjaminan Mutu Pendidikan	20
Implementasi SPMI dan Tantangan Peningkatan Mutu Pendidikan	23
Model Integratif Peningkatan Mutu Pendidikan	25
Implikasi dan Rekomendasi Kebijakan	28
Kesimpulan	29
Daftar Pustaka	30
Profil Penulis	32
BAB 3 BASELINE ASSESSMENT KUALITAS PEMBELAJARAN MENDALAM DI SMA MODEL PM & KKA SEBAGAI FONDASI TRANSFORMASI PENDIDIKAN BERBASIS DATA DI ERA AI	34
(Suharja)	
Pendahuluan	35
<i>Deep learning</i> Sebagai Paradigma Pendidikan Masa Depan	41

PM-KKA Dan Transformasi Pendidikan Indonesia.....	47
<i>Baseline Assessment</i> Sebagai <i>Educational Diagnosis</i>	51
Transformasi <i>Humanistic-Digital Learning Ecosystem</i>	55
Implikasi Terhadap Transformasi Pendidikan Indonesia	60
Pengembangan Model Konseptual <i>Deep learning Quality Improvement Framework</i>	64
Tantangan dan Masa Depan Pendidikan Era AI.....	70
Penutup	74
Daftar Pustaka.....	78
Profil Penulis.....	80
BAB 4 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN DASAR DI INDONESIA.....	81
(Zaimatus Sa'ida)	
Pendahuluan	82
Peta Regulasi Pendidikan Dasar	83
Telaah Implementasi Kebijakan Pendidikan Dasar	84
Evaluasi Kritis.....	90
Kesimpulan.....	91
Daftar Pustaka.....	92
Profil Penulis.....	95
BAB 5 KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI INDONESIA: DARI ORDE LAMA HINGGA ERA REFORMASI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP MANAJEMEN PENDIDIKAN.....	96
(Luluk Masruroh)	
Pendahuluan	97
Kebijakan Pendidikan Masa Orde Lama (1945–1966).....	98
Kebijakan Pendidikan Masa Orde Baru (1966–1998).....	99
Kebijakan Pendidikan Era Reformasi (1998–Sekarang)	101
Kebijakan Pendidikan Era Reformasi (1998–Sekarang)	103
Penutup	104
Daftar Pustaka.....	105
Profil Penulis.....	106

**BAB 6 ARSITEKTUR KOGNITIF BARU: MENGINSTITUSIKAN
KODING DAN KECERDASAN ARTIFISIAL SEBAGAI EPISENTRUM
BUDAYA PRESTASI DI PENDIDIKAN MENENGAH..... 107**

(Dian Milasari)

Pendahuluan	108
Koding dan <i>Computational Thinking</i> sebagai Navigasi Logika	109
Koding dan Kecerdasan Artifisial sebagai <i>Augmented Intelligence</i> dan Mitra Dialektis	112
Internalisasi <i>Digital Growth Mindset</i> dan Transformasi Identitas Prestasi dalam Ekosistem Pendidikan Masa Depan	114
Kepemimpinan <i>Learner-in-Chief</i> sebagai Katalisator Transformasi Pendidikan Digital	116
Rekonstruksi Arsitektur Kognitif dan Kedaulatan Digital Masa Depan.....	119
Daftar Pustaka.....	120
Profil Penulis.....	121

**BAB 7 PENDIDIKAN VOKASI DAN REVITALISASI SMK:
TRANSFORMASI SISTEM PENDIDIKAN KEJURUAN MENUJU
SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING 122**


(Moh. Uyub)

Konsep dan Tujuan Pendidikan Vokasi.....	123
Periodisasi Pendidikan Vokasi SMK di Indonesia.....	124
Kondisi SMK Sebelum Revitalisasi: Potret Kesenjangan	126
Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016: Fondasi Kebijakan Revitalisasi	127
Lima Pilar Utama Revitalisasi SMK	129
Bidang Prioritas Revitalisasi SMK	131
Peran Strategis Kepala Sekolah dalam Revitalisasi.....	133
Kesimpulan	136
Daftar Pustaka.....	137
Profil Penulis.....	139

BAB 8 PENDIDIKAN FORMAL DAN NONFORMAL: KESETARAAN AKSES DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEBAGAI PILAR TRANSFORMASI SOSIAL.....	140
(Bambang Dwi Wijayanto)	
Pendahuluan	141
Potret Kesenjangan Pendidikan di Indonesia	142
Lima Dimensi Ketidaksetaraan Pendidikan.....	143
Konsep Pemberdayaan dalam Konteks Pendidikan	146
Model Integrasi Pendidikan Formal-Nonformal.....	147
Pendidikan Nonformal sebagai Katalis Transformasi Sosial:	
Studi Kasus dan Faktor Kunci Keberhasilan.....	148
Implementasi Kebijakan.....	150
Daftar Pustaka.....	153
Profil Penulis.....	155
BAB 9 PERAN DOSEN DALAM MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MAHASISWA DI ERA TRANSFORMASI PENDIDIKAN TINGGI	156
(Dian Erliyani)	
Pendahuluan	157
Dosen sebagai Fasilitator Pembelajaran Aktif.....	159
Pengaruh Hubungan Interpersonal Dosen dan Mahasiswa....	160
Integrasi Teknologi dalam Pembelajaran	162
Peran Dosen dalam Pengembangan Kompetensi Mahasiswa	164
Menanggapi <i>Counterargument</i>	165
Implikasi bagi Pendidikan Tinggi.....	166
Model Konseptual Integratif Peran Dosen dalam Meningkatkan Hasil Belajar Mahasiswa.....	167
Kesimpulan.....	168
Daftar Pustaka.....	171
Profil Penulis.....	173
BAB 10 KRITIK KEBIJAKAN PENDIDIKAN TINGGI: KRISIS STRUKTURAL DAN STRATEGI TRANSFORMASI MENUJU INDONESIA EMAS 2045	174
(Radini Sinta)	
Pendahuluan	175
Filosofi dan Fondasi Hukum Pendidikan Tinggi.....	175
Dari Publik ke Komoditas	176

Tantangan Klasik Pendidikan Tinggi Indonesia	178
Komersialisasi dan Krisis Akses	179
Neoliberalisme, NPM, dan Krisis Tata Kelola	181
Ancaman Epistemik: Kematian Pengetahuan Dasar dan Hilangnya Fondasi Peradaban.....	182
Kampus yang Tidak Ramah bagi Semua Orang.....	184
Krisis Ekspektasi Digital dan Kesenjangan Teknologi.....	185
Ilusi Kemajuan di Balik Angka.....	186
Jebakan Pendapatan Menengah dan Kesenjangan Inovasi.....	187
Dari Komoditas ke Investasi Publik.....	188
Peta Jalan Kebijakan 2024–2029	190
Tantangan Implementasi dan Jalan ke Depan	192
Penutup	193
Daftar Pustaka.....	195
Profil Penulis	197
BAB 11 EVALUASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN RAMAH ANAK, KESETARAAN GENDER, DAN INKLUSI DISABILITAS DALAM PERSPEKTIF PIERRE BOURDIEU: ANTARA IDEALITAS KEBIJAKAN DAN REALITAS HABITUS INSTITUSIONAL	198
(Edi Kuhen)	
Pendahuluan	199
Pergeseran Esensi: Menuju Pendidikan <i>Humanis</i>	199
Idealitas Kebijakan (<i>Das Sollen</i>)	200
Realitas Lapangan (<i>Das Sein</i>): Munculnya Kesenjangan.....	202
Data Kekerasan pada Anak (Krisis Modal Sosial)	204
Ketimpangan Fasilitas Disabilitas (Krisis Modal Ekonomi)....	204
Stereotip Gender dalam Kurikulum (Kekerasan Simbolik) ...	205
Habitus Birokratis vs Habitus Inklusif.....	206
Kekerasan Simbolik dalam Inklusi.....	207
Kesimpulan	208
Daftar Pustaka.....	210
Profil Penulis.....	212
BAB 12 DINAMIKA DAN KEBIJAKAN MUTU PENDIDIKAN TERHADAP DAYA SAING BANGSA INDONESIA.....	213
(Renza Maisetyo)	
Pendahuluan	214

Pilar Peningkatan Mutu: Guru, Digitalisasi, dan Sarana	
Prasarana.....	215
Pilar Perbaikan Mutu Pendidikan.....	217
Strategi Membangun Budaya Mutu dan Keterlibatan	
Masyarakat.....	218
Hambatan dan Tantangan Implementasi di Lapangan.....	219
Implikasi Teoretis dan Praktis	221
Kesimpulan dan Saran Peningkatan Mutu Pendidikan Terhadap	
Daya Saing Bangsa.....	222
Daftar Pustaka.....	225
Profil Penulis.....	226



BAB 1
OTONOMI DAN
DESENTRALISASI
PENDIDIKAN: KAJIAN
KONSEPTUAL, REGULASI,
DAN IMPLEMENTASI DI
INDONESIA

Jose Beno, S.St, M.Si.
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang



Pendahuluan

Tata kelola pendidikan merupakan arena yang selalu berubah, mencerminkan dinamika hubungan antara negara, pasar, dan masyarakat sipil dalam menentukan siapa yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan tentang apa dan bagaimana pendidikan diselenggarakan. Di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, pertengahan dekade 1990-an hingga awal 2000-an menandai pergeseran paradigma besar dari sistem pendidikan yang terpusat (sentralistik) menuju sistem yang lebih terdesentralisasi, di mana kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan pendidikan dialihkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan bahkan ke tingkat satuan pendidikan.

Pergeseran ini tidak berlangsung dalam ruang hampa ideologis. Ia didorong oleh kombinasi faktor internal termasuk tekanan demokratisasi pasca-Orde Baru, kesadaran akan keberagaman kebutuhan lokal, dan ketidakpuasan terhadap birokrasi pendidikan yang gemuk dan tidak responsif dan faktor eksternal berupa pengaruh lembaga-lembaga internasional seperti Bank Dunia dan UNDP yang mempromosikan desentralisasi sebagai bagian dari agenda tata kelola yang baik (*good governance*).

Rondinelli dan Cheema (1983), yang merupakan di antara teoretisi paling berpengaruh dalam studi desentralisasi, mendefinisikan desentralisasi sebagai "*the transfer of planning, decision-making, or administrative authority from the central government to its field organizations, local administrative units, local governments, or non-governmental organizations.*" Definisi ini membuka ruang bagi berbagai bentuk dan gradasi desentralisasi yang memiliki implikasi berbeda-beda bagi tata kelola pendidikan.

Chapter ini disusun dalam kerangka analisis multidimensional. Bagian pertama menelaah landasan konseptual otonomi dan desentralisasi pendidikan beserta tipologinya. Bagian kedua mengkaji evolusi kebijakan desentralisasi pendidikan di Indonesia sejak era reformasi. Bagian ketiga menganalisis implementasi manajemen berbasis sekolah sebagai perwujudan otonomi di tingkat satuan pendidikan. Bagian keempat mendiskusikan tantangan dan dilema yang dihadapi, dan bagian penutup mengajukan refleksi serta rekomendasi prospektif.

Landasan Konseptual: Otonomi dan Desentralisasi

1. Konsep Otonomi dalam Pendidikan

Otonomi dalam konteks pendidikan memiliki makna yang berlapis. Pada tingkat sistem, otonomi merujuk pada kebebasan lembaga-lembaga pendidikan dari kontrol langsung pemerintah dalam menentukan arah, standar, dan pengelolaan pendidikan. Pada tingkat institusi, otonomi berarti kapasitas satuan pendidikan untuk membuat keputusan-keputusan strategis yang berkaitan dengan kurikulum, personalia, keuangan, dan hubungan dengan komunitas. Pada tingkat individu, otonomi terkait dengan kebebasan akademik tenaga pendidik dan hak peserta didik untuk mengembangkan potensi mereka secara penuh.

Nedelcu (2008) mengajukan konsep "*school autonomy*" sebagai kemampuan sekolah untuk mengembangkan identitas kelembagaan yang khas sambil tetap bertanggung jawab terhadap standar publik. Dalam pandangannya, otonomi bukanlah kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang bertanggung jawab (*accountable autonomy*) yang dioperasionalkan melalui mekanisme-mekanisme akuntabilitas yang jelas dan transparan.

"Autonomy without accountability is irresponsibility; accountability without autonomy is bureaucracy. The art of good governance in education lies in maintaining a creative tension between these two imperatives." — Nedelcu (2008, p. 47)

Sementara itu, Weiler (1990) dalam kajiannya yang berpengaruh tentang desentralisasi pendidikan di negara-negara maju memperkenalkan konsep "*legitimation*" sebagai motif tersembunyi di balik kebijakan desentralisasi. Menurutnya, desentralisasi sering kali digunakan oleh pemerintah pusat bukan semata-mata untuk efisiensi atau demokratisasi, tetapi untuk mengalihkan konflik dan ketegangan yang melekat dalam kebijakan pendidikan kepada aktor-aktor lokal, sambil mempertahankan kontrol normatif melalui standar nasional.

2. Tipologi Desentralisasi Pendidikan

Rondinelli dan Cheema (1983) membedakan empat bentuk utama desentralisasi yang relevan untuk tata kelola pendidikan:

Daftar Pustaka

- Brodjonegoro, B. (2001). Indonesian intergovernmental transfer in decentralization era: The case of general allocation fund. Working Paper, Institute for Economic and Social Research, University of Indonesia.
- Caldwell, B. J. (2005). School-based management. International Academy of Education, International Institute for Educational Planning, UNESCO.
- Faguet, J. P. (2012). Decentralization and popular democracy: Governance from below in Bolivia. University of Michigan Press.
- Fisman, R., & Gatti, R. (2002). Decentralization and corruption: Evidence across countries. *Journal of Public Economics*, 83(3), 325–345. [https://doi.org/10.1016/S0047-2727\(00\)00158-4](https://doi.org/10.1016/S0047-2727(00)00158-4)
- Hanson, E. M. (2000). Democratization and educational decentralization in Spain: A twenty year struggle for reform. Education Reform and Management Publication Series, Vol. 1, No. 3. World Bank.
- Leithwood, K., & Menzies, T. (1998). Forms and effects of school-based management: A review. *Educational Policy*, 12(3), 325–346.
- Malen, B., Ogawa, R. T., & Kranz, J. (1990). What do we know about school-based management? A case study of the literature. In W. H. Clune & J. F. Witte (Eds.), *Choice and control in American education*, Vol. 2 (pp. 289–342). Falmer Press.
- McGinn, N., & Welsh, T. (1999). Decentralization of education: Why, when, what and how? *Fundamentals of Educational Planning*, No. 64. UNESCO International Institute for Educational Planning.
- Mulyasa, E. (2007). *Manajemen berbasis sekolah: Konsep, strategi, dan implementasi*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nedelcu, A. (2008). Developing autonomous schools in Romania: Between theory and practice. *European Education*, 40(1), 39–55.
- Osei-Kofi, N., Torres, L. E., & Lui, J. (2012). Practices of whiteness: Racialization in college admissions viewbooks. *Race Ethnicity and Education*, 16(3), 386–405.

- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.
- Rondinelli, D. A., & Cheema, G. S. (1983). Implementing decentralization policies: An introduction. In G. S. Cheema & D. A. Rondinelli (Eds.), *Decentralization and development: Policy implementation in developing countries* (pp. 9–34). SAGE Publications.
- Spillane, J. P. (2006). *Distributed leadership*. Jossey-Bass.
- Tilaar, H. A. R. (2000). *Pendidikan, kebudayaan, dan masyarakat madani Indonesia: Strategi reformasi pendidikan nasional*. PT Remaja Rosdakarya.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Weiler, H. N. (1990). Comparative perspectives on educational decentralization: An exercise in contradiction? *Educational Evaluation and Policy Analysis*, 12(4), 433–448.

PROFIL PENULIS




Jose Beno, S.St, M.Si.

Lahir di Nitibe, Usi Taco, Timor – Timur, 12 September 1975. Riwayat Pendidikan: menyelesaikan Sekolah Dasar di SDN 04 Citrana 1985 - 1991, SMPN Baocnana 1991 – 1994, SMEAN Oecusse 1994 – 1997, Pendidikan Diploma IV di Balai Pendidikan Latihan Pelayaran (BPLP) sekarang Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang 1997 - 2001, kemudian melanjutkan ke Pasca Sarjana S2 Magister Sains pada Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang 2010 - 2012. Mengawali karier sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Kementerian Perhubungan tahun 2002 - 2015, dan beberapa kali mengalami perpindahan tugas dari PIP Semarang ke Balai Pendidikan dan Pelatihan Pelayaran Padang Pariaman sekarang Politeknik Pelayaran Sumatera Barat (Oktober 2015 – Juni 2023) dan Politeknik Pelayaran Surabaya (Juni 2023 – Agustus 2024) dan saat ini Kembali bertugas di Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang.

Adapun beberapa Pelatihan yang telah di ikuti penulis adalah Pekerti dan AA di Universitas Negeri Semarang (UNNES), Diklat Pengasuh Taruna Bagi Taruna BPSDM Perhubungan di Akademi Militer Magelang, TOT IMO Model Course 6.09, TOT IMO 3.12, Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Kementerian Perhubungan di Pusat Pengembangan Aparatur Perhubungan Bogor, Diklat Keselamatan Transportasi, Diklat Pelatihan Kesyahbandaran Kelas B. Dalam perjalanan karirnya, penulis pernah menduduki berbagai jabatan di antaranya Kepala Unit Pembinaan Mental Moral dan Kesamaptaan, Ketua Program Study Transportasi Laut, Kepala Pusat pengabdian Kepada Masyarakat, dan saat ini selain menjadi dosen juga menduduki jabatan sebagai Wakil Direktur 3. Penulis juga aktif menulis berbagai karya ilmiah seperti artikel penelitian, dan buku ajar.

Adapun Buku Ajar yang pernah ditulis oleh penulis adalah:

1. Budaya Keselamatan, Keamanan & Pelayanan Publik;
2. Pengantar Transportasi (Tulis Bersama);
3. Pengantar Manajemen Logistik
4. Audit K3 Sebagai Alat Kontrol Keselamatan Operasional (Tulis Bersama)
5. Kinerja SDM Sebagai Strategi Faktor Dalam Pengelolaan Logistik dan Pelabuhan (Tulis Bersama)
6. Manajemen Pergudaangan Pelabuhan.



BAB 2
KEBIJAKAN
PENINGKATAN MUTU
PENDIDIKAN

Noviah Dwi Putranti, S.Kom., M.Cs., M.Pd.
Universitas Negeri Semarang



Pendahuluan

Peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah merupakan salah satu agenda strategis dalam pembangunan nasional Indonesia. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga menjadi instrumen utama dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, adaptif, dan kompetitif di era globalisasi (Sallis, 2021). Selain itu, mutu pendidikan menjadi indikator penting dalam menentukan daya saing suatu bangsa di tengah perkembangan teknologi dan transformasi sosial yang semakin cepat (OECD, 2023).

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui kebijakan nasional yang berorientasi pada penjaminan mutu. Salah satu kebijakan penting adalah penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang diatur dalam Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016). Menurut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (2022), implementasi SPMI bertujuan membangun budaya mutu di satuan pendidikan melalui siklus PPEPP yang sistematis dan terintegrasi.

Selain SPMI, mekanisme akreditasi juga menjadi instrumen penting dalam penguatan mutu pendidikan. Akreditasi tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi terhadap kelayakan sekolah, tetapi juga menjadi sarana pembinaan mutu yang berkelanjutan. Melalui akreditasi, sekolah memperoleh gambaran mengenai kekuatan dan kelemahan dalam pengelolaan pendidikan sehingga dapat melakukan perbaikan secara sistematis.

Meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa mutu pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Ketimpangan kualitas antarwilayah, keterbatasan sumber daya manusia, belum optimalnya budaya mutu di sekolah, serta perbedaan kapasitas manajerial menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan mutu pendidikan.

Hasil *Programme for International Student Assessment (PISA)* pada tabel 2.1 juga menunjukkan bahwa kemampuan literasi dan numerasi peserta didik Indonesia masih memerlukan peningkatan.

Kondisi ini menegaskan bahwa peningkatan mutu pendidikan tidak cukup dilakukan melalui penyusunan regulasi semata, tetapi juga memerlukan integrasi antara sistem mutu, kepemimpinan, tata kelola organisasi, dan budaya mutu sekolah.

Tabel 2.1 Hasil PISA Indonesia Tahun 2018–2022

Aspek	Indonesia	Rata-rata OECD
Literasi Membaca	359	476
Matematika	366	472
Sains	383	485

Sumber: *Organisation for Economic Co-operation and Development*, (2023)

Dalam konteks tersebut, pembahasan mengenai penguatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), akreditasi, dan Standar Nasional Pendidikan menjadi sangat penting. Kajian ini tidak hanya membahas aspek regulatif, tetapi juga menganalisis bagaimana implementasi kebijakan mutu dilakukan di tingkat sekolah serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya.

Konsep dan Kebijakan Penjaminan Mutu Pendidikan

1. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan mekanisme penjaminan mutu yang dilaksanakan secara mandiri oleh satuan pendidikan. Tujuan utama SPMI adalah memastikan bahwa seluruh proses pendidikan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sehingga mutu pendidikan dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

SPMI dilaksanakan melalui siklus PPEPP yang terdiri atas Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan. Siklus ini menekankan prinsip *continuous improvement* dalam pengelolaan pendidikan (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022). Dalam praktiknya, sekolah dituntut untuk mampu merencanakan program mutu, melaksanakan kegiatan sesuai standar, mengevaluasi hasil pelaksanaan,

Daftar Pustaka

- Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. (2024). *Data akreditasi sekolah Indonesia tahun 2024*. BAN-PDM. <https://banpdm.kemdikbud.go.id>
- Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah. (2023). *Instrumen akreditasi satuan pendidikan terbaru*. BAN-S/M.
- Fullan, M. (2020). *Leading in a culture of change*. Jossey-Bass.
- Hallinger, P. (2021). Leadership and school quality improvement. *Educational Management Administration & Leadership*, 49(6), 867–880.
- Haryono, S., Kristiawan, M., & Fitriani, Y. (2021). Implementation of internal quality assurance systems in Indonesian schools. *International Journal of Educational Management*, 35(4), 755–768.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2016). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kemdikbud. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/224208/permen-dikbud-no-28-tahun-2016>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). *Pedoman implementasi sistem penjaminan mutu internal pendidikan dasar dan menengah*. Kemendikbudristek.
- Leithwood, K., Harris, A., & Hopkins, D. (2020). Seven strong claims about successful school leadership revisited. *School Leadership & Management*, 40(1), 5–22.
- Maghfiroh, L., & Immilsa, R. (2025). School governance and accreditation quality in Indonesian education. *Journal of Educational Policy and Leadership*, 12(2), 45–60.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2023). *PISA 2022 results: The state of learning and equity in education*. OECD Publishing.
- Sallis, Edward. (2021). *Total quality management in education* (4th ed.). Routledge.

Schein, Edgar H. & Schein, Peter A. (2021). *Organizational culture and leadership* (6th ed.). Wiley.

UNESCO. (2023). *Global education monitoring report 2023: Technology in education*. UNESCO Publishing.

World Bank. (2022). *Education quality and learning recovery in developing countries*. World Bank Publications.

PROFIL PENULIS



Noviah Dwi Putranti, S.Kom., M.Cs., M.Pd.

Penulis adalah seorang akademisi dan peneliti yang aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi pendidikan, dengan latar belakang akademik yang kuat di bidang Ilmu Komputer, *Computational Science* dan Manajemen Pendidikan. Integrasi keahlian multidisiplin ini memberikan fondasi metodologis yang kokoh dalam menghasilkan karya ilmiah dan kontribusi akademik yang relevan bagi dunia pendidikan di era digital.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana pada Program Studi Ilmu Komputer, kemudian melanjutkan studi magister pertama pada bidang *Computational Science* di Fakultas MIPA Universitas Gadjah Mada dan studi magister kedua pada bidang Administrasi Pendidikan di Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan di Universitas Tanjungpura. Konstelasi keilmuan ini membuat penulis mengembangkan pendekatan riset yang sinergis antara teknologi dan pedagogi, khususnya dalam pengembangan model pembelajaran inovatif, pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen pendidikan, serta penguatan kompetensi guru dalam menghadapi transformasi digital.

Dalam kapasitasnya sebagai guru di SMA Negeri 3 Pontianak, dosen dan peneliti di perguruan tinggi, penulis terlibat aktif dalam pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Fokus penelitian penulis meliputi:

1. Pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi digital
2. Desain pembelajaran inovatif dan adaptif
3. Literasi digital dan kompetensi abad ke-21
4. Sistem informasi pendidikan dan manajemen pembelajaran
5. Integrasi teknologi untuk peningkatan mutu proses pembelajaran


Penulis telah menghasilkan berbagai publikasi dalam bentuk artikel jurnal nasional dan internasional, prosiding konferensi, serta keterlibatan dalam penulisan buku dan book chapter ilmiah. Karya-karya penulis berorientasi pada penerapan teknologi sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan efektivitas manajerial dalam institusi pendidikan.

Selain kiprah akademik, penulis juga terlibat sebagai pemateri dalam berbagai pelatihan dan *workshop* profesional, khususnya terkait literasi digital, pengembangan media pembelajaran, serta implementasi strategi pembelajaran inovatif bagi pendidik. Komitmen ini menunjukkan dedikasi penulis dalam memperkuat kapasitas guru dan tenaga kependidikan sebagai garda terdepan perubahan pendidikan.

Melalui kompetensi akademik, pengalaman riset, dan kontribusi profesional yang berkelanjutan, Noviah Dwi Putranti terus memainkan peran penting dalam pengembangan pengetahuan dan praktik pendidikan berbasis teknologi, serta memberikan dampak pada peningkatan kualitas pembelajaran dan tata kelola pendidikan di Indonesia.

Email Penulis : noviahdwiputranti@students.unnes.ac.id

 ORCID ID : <https://orcid.org/0009-0009-1007-7101>



BAB 3
BASELINE ASSESSMENT
KUALITAS PEMBELAJARAN
MENDALAM DI SMA
MODEL PM & KKA SEBAGAI
FONDASI TRANSFORMASI
PENDIDIKAN BERBASIS
DATA DI ERA AI

Suharja, S.Pd., M.Si.
Kepala SMA Negeri 1 Kartasura, Sukoharjo



Pendahuluan

Perkembangan *Artificial intelligence* (AI), revolusi digital, big data, *Internet of Things* (IoT), dan *society 5.0* telah mengubah lanskap pendidikan global secara fundamental. Pendidikan abad ke-21 tidak lagi hanya berorientasi pada penguasaan pengetahuan faktual, tetapi diarahkan pada pengembangan kompetensi berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, literasi digital, kemampuan adaptif, dan pembelajaran sepanjang hayat (*lifelong learning*) (OECD, 2023). Perubahan tersebut menuntut sekolah melakukan transformasi paradigma pembelajaran agar mampu menghasilkan lulusan yang siap menghadapi kompleksitas perubahan sosial, ekonomi, budaya, dan teknologi di masa depan. Dalam konteks global, berbagai laporan internasional menunjukkan bahwa dunia pendidikan menghadapi tantangan serius berupa *learning crisis*, ketimpangan kualitas pembelajaran, dan ketidaksesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan masa depan.

UNESCO (2021) menegaskan bahwa pendidikan masa depan memerlukan rekonstruksi paradigma pembelajaran yang lebih *humanistik*, reflektif, kolaboratif, dan berorientasi pada keberlanjutan kehidupan manusia. Pendidikan tidak lagi cukup berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi harus membangun kemampuan peserta didik untuk memahami realitas secara kritis, mengambil keputusan etis, dan menciptakan solusi terhadap persoalan nyata kehidupan. *Artificial intelligence* juga mulai mengubah pola pembelajaran, asesmen, dan interaksi pendidikan secara signifikan. Teknologi AI memungkinkan personalisasi pembelajaran, *adaptive assessment*, *learning analytics*, dan pengembangan ekosistem pembelajaran digital yang lebih fleksibel (Holmes et al., 2022). Namun demikian berdampak pada *dehumanisasi* pembelajaran, ketergantungan teknologi, kesenjangan digital, serta menurunnya kualitas interaksi sosial dan refleksi pembelajaran apabila teknologi digunakan tanpa pendekatan pedagogis yang tepat (Selwyn, 2022).

World Economic Forum (2023) menjelaskan bahwa kompetensi masa depan yang paling dibutuhkan meliputi *analytical thinking*, *creative thinking*, *resilience*, *curiosity*, *technological literacy*, *lifelong*

learning, empathy dan *collaboration*. Kompetensi tersebut tidak dapat dibangun melalui hafalan, tetapi memerlukan pembelajaran mendalam yang memungkinkan peserta didik membangun makna, refleksi, kreativitas, dan kemampuan memecahkan masalah autentik. Dalam konteks Indonesia, transformasi pendidikan mulai diarahkan melalui implementasi Kurikulum Merdeka, pembelajaran berdiferensiasi, penguatan Delapan (8) Dimensi Profil Lulusan, serta kebijakan Pembelajaran Mendalam, Asesmen, Koding, dan Kecerdasan Artifisial (PM-KKA). Kebijakan tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma pendidikan nasional menuju pembelajaran yang lebih berpusat pada murid, reflektif, kontekstual, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital.

Kemendikdasmen (2025) menegaskan pendekatan holistik. Pendekatan ini bertujuan membangun pengalaman belajar yang mampu mengembangkan karakter, kompetensi, dan kapasitas reflektif peserta didik secara utuh. Meskipun demikian, transformasi pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Banyak sekolah telah menggunakan teknologi digital, tetapi belum sepenuhnya mampu membangun pembelajaran reflektif, diferensiasi pembelajaran, *student agency*, dan asesmen berbasis data secara optimal. Pembelajaran masih cenderung berorientasi pada penyelesaian materi dan capaian administratif dibanding membangun pengalaman belajar bermakna. Selain itu, implementasi AI dalam pendidikan masih berada pada tahap awal.

Sebagian besar penggunaan teknologi di sekolah masih berfokus pada digitalisasi administrasi dan penyampaian materi, belum diarahkan pada pengembangan AI pedagogis yang mendukung pembelajaran personal, reflektif, dan adaptif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transformasi pendidikan memerlukan perubahan tidak hanya pada aspek teknologi, tetapi juga pada budaya pedagogis, kepemimpinan pembelajaran, dan ekosistem belajar sekolah. Dalam perspektif transformasi pendidikan modern, kualitas pembelajaran menjadi indikator utama keberhasilan reformasi pendidikan. Hattie (2021) menegaskan bahwa kualitas pengalaman belajar memiliki pengaruh lebih besar terhadap keberhasilan pendidikan dibanding sekadar penggunaan teknologi atau perubahan

Daftar Pustaka

- Biesta, G. (2022). *World-Centred Education: A View for the Present*. Routledge.
- Black, P., & Wiliam, D. (2021). Classroom assessment and pedagogy. *Assessment in Education: Principles, Policy & Practice*, 28(3), 223–245. <https://doi.org/10.1080/0969594X.2021.1884042>
- Carr, N. (2020). *The Shallows: What the Internet Is Doing to Our Brains*. W. W. Norton & Company.
- Coburn, C. E., & Turner, E. O. (2022). Research on data use: A framework and analysis. *Measurement: Interdisciplinary Research and Perspectives*, 20(2), 113–129. <https://doi.org/10.1080/15366367.2021.1955097>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (6th ed.). Sage Publications.
- Darling-Hammond, L., Flook, L., Cook-Harvey, C., Barron, B., & Osher, D. (2021). Implications for educational practice of the science of learning and development. *Applied Developmental Science*, 25(2), 97–140. <https://doi.org/10.1080/10888691.2018.1537791>
- Datnow, A., & Park, V. (2021). *Data-Driven Leadership*. Jossey-Bass.
- Fredricks, J. A., Reschly, A. L., & Christenson, S. L. (2022). *Handbook of Student Engagement Interventions*. Academic Press.
- Fullan, M., Quinn, J., & McEachen, J. (2020). *Deep learning: Engage the World Change the World*. Corwin Press.
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2022). *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)* (3rd ed.). Sage Publications.
- Hallinger, P. (2022). Leadership and school improvement: How successful leaders influence teaching and learning. *Educational Administration Quarterly*, 58(1), 3–39. <https://doi.org/10.1177/0013161X2111040>
- Hallinger, P., & Kulophas, D. (2020). The evolving knowledge base on leadership and teacher professional learning. *Professional*

- Development in Education*, 46(4), 521–540.
<https://doi.org/10.1080/19415257.2019.1623287>
- Hargreaves, A., & O'Connor, M. T. (2020). *Collaborative Professionalism*. Corwin Press.
- Hattie, J. (2021). *Visible Learning: The Sequel*. Routledge.
- Holmes, W., Bialik, M., & Fadel, C. (2022). *Artificial intelligence in Education: Promises and Implications for Teaching and Learning*. Center for Curriculum Redesign.
- Kemendikdasmen. (2025). *Panduan Pembelajaran dan Asesmen Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah*. Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan.
- Leithwood, K., Harris, A., & Hopkins, D. (2021). Seven strong claims about successful school leadership revisited. *School Leadership & Management*, 41(1–2), 5–22.
<https://doi.org/10.1080/13632434.2020.1796076>
- Luckin, R. (2022). *AI for Schoolteachers*. Routledge.
- Noddings, N. (2021). *Caring in Education*. Teachers College Press.
- OECD. (2023). *Future of Education and Skills 2030*. OECD Publishing.
- Schön, D. A. (2020). *The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action*. Routledge.
- Selwyn, N. (2022). *Education and Technology: Key Issues and Debates* (3rd ed.). Bloomsbury Academic.
- Senge, P. M. (2021). *The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization*. Currency.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- UNESCO. (2021). *Reimagining Our Futures Together: A New Social Contract for Education*. UNESCO Publishing.
- UNESCO. (2023). *Guidance for Generative AI in Education and Research*. UNESCO Publishing.
- World Economic Forum. (2023). *The Future of Jobs Report 2023*.

PROFIL PENULIS



Suharja, S.Pd., M.Si.

Penulis merupakan alumni Pendidikan Biologi D3 dan S1 Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), menyelesaikan S2 Biosain Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, saat ini sedang mengikuti Pendidikan S3 Manajemen Pendidikan UNNES.



BAB 4
IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN
PENDIDIKAN DASAR
DI INDONESIA

Zaimatus Sa'ida
Universitas Negeri Semarang



Pendahuluan

Pendidikan dasar berada pada posisi strategis dalam pembangunan manusia karena pada jenjang SD dan SMP peserta didik membangun fondasi literasi, numerasi, karakter, kecakapan sosial, serta kesiapan berpikir untuk memasuki jenjang pendidikan berikutnya. Karena itu, kebijakan pendidikan dasar tidak cukup dibaca sebagai aturan administratif, melainkan sebagai instrumen negara untuk menjamin hak belajar, pemerataan kesempatan, mutu layanan, dan perlindungan peserta didik di seluruh wilayah Indonesia (Republik Indonesia, 2003).

Dalam beberapa tahun terakhir, regulasi pendidikan dasar mengalami pembaruan yang intensif. Pemerintah memperkuat Standar Nasional Pendidikan, menata kurikulum, memperbarui standar proses, mendorong evaluasi berbasis data, mengatur penerimaan murid baru, memperbarui tata kelola pembiayaan operasional, membuka ruang partisipasi masyarakat, serta menegaskan pentingnya budaya sekolah yang aman dan nyaman. Arah tersebut menunjukkan pergeseran dari kepatuhan dokumen menuju tata kelola mutu yang lebih menyeluruh dan berdampak pada pembelajaran (Republik Indonesia, 2021; Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2026a).

Namun, persoalan utama kebijakan pendidikan di Indonesia kerap bukan terletak pada ketiadaan regulasi, melainkan pada jarak antara norma kebijakan dan praktik sekolah. Sekolah menghadapi perbedaan kapasitas guru, variasi kepemimpinan kepala sekolah, keterbatasan sarana, beban administrasi, ketimpangan dukungan daerah, dan budaya penggunaan data yang belum kuat. Akibatnya, regulasi yang secara normatif baik belum selalu berubah menjadi pengalaman belajar yang lebih bermutu bagi peserta didik.

Bab ini menelaah regulasi kunci pendidikan dasar, membaca tantangan implementasinya di sekolah, serta menawarkan kritik membangun dan rekomendasi. Telaah dilakukan dengan menempatkan regulasi sebagai ekosistem kebijakan: standar mutu, kurikulum, asesmen, guru dan kepala sekolah, pembiayaan, akses, perlindungan, serta partisipasi masyarakat. Dengan cara itu,

pembahasan tidak berhenti pada daftar peraturan, tetapi bergerak pada pertanyaan inti: bagaimana teks regulasi dapat diterjemahkan menjadi perubahan nyata di ruang kelas?

Peta Regulasi Pendidikan Dasar

Regulasi pendidikan dasar tersusun secara berlapis. Pada tingkat undang-undang, dasar utamanya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pada tingkat yang lebih operasional, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 4 Tahun 2022 menjadi payung Standar Nasional Pendidikan. Regulasi tersebut memberi arah bahwa layanan pendidikan harus menjamin pemerataan, peningkatan mutu, relevansi, dan profesionalitas pendidik (Republik Indonesia, 2005; Republik Indonesia, 2022).

Jika dibaca dari sudut implementasi, regulasi pendidikan dasar dapat dikelompokkan ke dalam tujuh rumpun. Pertama, standar mutu pendidikan. Kedua, kurikulum dan pembelajaran. Ketiga, evaluasi dan akuntabilitas. Keempat, pendidik, tenaga kependidikan, dan kepemimpinan sekolah. Kelima, pembiayaan dan sarana-prasarana. Keenam, akses dan keadilan layanan. Ketujuh, perlindungan warga sekolah dan partisipasi masyarakat. Pengelompokan ini penting karena sekolah tidak melaksanakan kebijakan secara terpisah, tetapi menerima keseluruhan regulasi sebagai satu ekosistem kerja.

Tabel 4.1: Rumpun Regulasi dan Arah Implementasi di Pendidikan Dasar

Rumpun Kebijakan	Regulasi Kunci	Arah Implementasi di Sekolah
Standar mutu	UU 20/2003; PP 57/2021 jo. PP 4/2022	Menjadi pagar mutu minimal untuk kurikulum, proses, penilaian, pengelolaan, pembiayaan, sarana, dan lulusan.
Kurikulum dan pembelajaran	Permendikbudristek 12/2024 jo.	Mengarahkan pembelajaran yang esensial, bermakna, aman,

Daftar Pustaka

- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and policy implementation in the third world*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2025a). *Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2025b). *Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2026a). *Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Standar Proses pada PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2026b). *Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2026 tentang Partisipasi Semesta Pendidikan Bermutu*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2026c). *Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2026d). *Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2021).

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022a). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.* Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022b). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.* Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023a). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Pembiayaan pada PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.* Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023b). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2023 tentang Penyusunan, Penyediaan, Pendistribusian, dan Penggunaan Buku Pendidikan.* Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023c). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.* Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023d). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi*

Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2024). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.* Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.* Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2005). *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.* Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.* Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.* Jakarta: Sekretariat Negara.

Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). *The policy implementation process: A conceptual framework.* *Administration & Society*, 6(4), 445-488


PROFIL PENULIS



Zaimatus Sa'ida

Penulis lahir di sebuah kecamatan di Kabupaten Malang. Pendidikan SD hingga SMP ditempuh di daerah kelahiran, lalu melanjutkan ke SMAN Kepanjen Malang. Ia menyelesaikan S1 di IKIP Malang tahun 1996, S2 Pendidikan Sains Biologi di Universitas Negeri Surabaya, dan saat ini menempuh S3 Manajemen Pendidikan di Universitas Negeri Semarang. Sejak 2017 hingga sekarang, penulis aktif sebagai Asesor BAN-PDM tingkat provinsi. Sehari-hari bertugas sebagai widyaiswara pada UPT Kemendikdasmen. Perkembangan pengalaman instruktur dan fasilitatornya tampak bertahap. Pada tahun 2002 ia menjadi Instruktur Kurikulum KBK; Fasnas untuk fasilitasi Rapor Mutu dan sejak 2017 mendampingi sekolah rujukan dan sekolah model; pada tahun 2021 menjadi Pelatih Ahli dengan pendampingan lima kepala sekolah di Kalimantan Tengah; pada tahun 2023–2024 menjadi Fasilitator Guru Penggerak daerah 3T di Papua dan Wakatobi, sekaligus aktif menulis buku Pendidikan Karakter untuk Anak Usia Dini dan Anti Toxic Mind. Pada tahun 2025 ia menjadi pengajar TOT Fasilitator BCKS, TOT PM Kepala Sekolah, fasilitator PM Kepala Sekolah, fasilitator BCKS, serta tim pengembang modul Inkuiri Kolaboratif bagi Kepala Sekolah di UPT Kemendikdasmen. Pada tahun 2026 ia menjadi tim pengembang modul pendampingan pengawas sekolah, Fasnas Sekolah Model PM-KKA, serta Instruktur FKK Kepala Sekolah SMA di Jateng.

Email Penulis: zaimatus04@gmail.com



BAB 5

**KEBIJAKAN PENDIDIKAN
DI INDONESIA: DARI ORDE
LAMA HINGGA ERA
REFORMASI DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP
MANAJEMEN PENDIDIKAN**

Luluk Masruroh, S.Si., M.Pd.
Universitas Negeri Semarang



Pendahuluan

Kebijakan pendidikan merupakan bagian fundamental dari kebijakan publik yang dirancang oleh pemerintah untuk memecahkan berbagai persoalan strategis di bidang pendidikan. Menurut Dunn (2003), kebijakan publik pada dasarnya adalah serangkaian keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk memecahkan masalah publik. Dinamika kebijakan pendidikan di Indonesia selalu mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh konstelasi politik, ideologi, dan visi pembangunan penguasa pada zamannya. Pemahaman mengenai sejarah kebijakan pendidikan menjadi penting karena dapat membantu para praktisi manajemen pendidikan dalam mengidentifikasi akar permasalahan serta merancang tata kelola pendidikan yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan sosial dan perkembangan zaman (Tilaar, 2012; Mulyasa, 2018).

Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam membentuk karakter bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pada perspektif pembangunan nasional, pendidikan memiliki peran penting dalam menciptakan masyarakat yang cerdas, kompetitif, dan berdaya saing global. Perubahan kebijakan pendidikan selalu memiliki implikasi yang luas terhadap sistem pembelajaran, tata kelola kelembagaan, hingga kualitas lulusan yang dihasilkan (Suryadi, 2020). Selain itu, keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan juga sangat dipengaruhi oleh kapasitas manajemen pendidikan dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam praktik operasional di lingkungan sekolah maupun perguruan tinggi (Fathurrohman, 2019).

Perkembangan globalisasi dan transformasi digital pada era modern turut mendorong perubahan paradigma pendidikan di Indonesia. Pemerintah dituntut untuk menghadirkan sistem pendidikan yang mampu menjawab tantangan abad ke-21, seperti penguatan literasi digital, kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan inovasi. Menurut hasil penelitian dalam jurnal pendidikan nasional, kebijakan pendidikan yang adaptif dan berbasis kebutuhan masyarakat menjadi salah satu faktor utama dalam meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan (Prasetyo &

Widodo, 2021). Pada sisi yang lain, reformasi kebijakan pendidikan juga menekankan pentingnya desentralisasi pengelolaan pendidikan agar daerah memiliki fleksibilitas dalam mengembangkan potensi lokal sesuai kebutuhan masyarakatnya (Hasbullah, 2015).

Kajian historis mengenai kebijakan pendidikan di Indonesia menjadi relevan untuk memahami perubahan orientasi pendidikan dari masa ke masa sekaligus menganalisis implikasinya terhadap manajemen pendidikan kontemporer. Melalui kajian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara kebijakan negara, sistem pendidikan, dan pengelolaan lembaga pendidikan dalam mendukung terciptanya kualitas pendidikan nasional yang lebih baik (Arifin, 2022; Wahyudin, 2021).

Kebijakan Pendidikan Masa Orde Lama (1945–1966)

Pada masa pasca-kemerdekaan hingga pertengahan tahun 1960-an, kebijakan pendidikan di Indonesia berada di bawah kendali pemerintahan Orde Lama. Karakter utama kebijakan pendidikan pada era ini sangat kental dengan nuansa ideologis dan berorientasi pada proses nation building atau pembentukan karakter bangsa. Pemerintah memandang pendidikan sebagai alat strategis untuk memperkuat identitas nasional, menanamkan semangat nasionalisme, serta membangun loyalitas masyarakat terhadap negara yang baru merdeka. Sistem pendidikan pada masa ini tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan kemampuan akademik peserta didik, tetapi juga untuk membentuk warga negara yang memiliki kesadaran politik dan jiwa patriotisme yang tinggi (Tilaar, 2012).

Pemerintah Orde Lama menggunakan pendidikan sebagai instrumen utama dalam proses pembentukan ideologi nasional. Kurikulum pendidikan dirancang agar selaras dengan arah politik negara, terutama dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila, semangat anti-kolonialisme, dan konsep demokrasi terpimpin. Pendidikan juga diarahkan untuk mendukung cita-cita revolusi nasional yang digaungkan oleh Presiden Soekarno. Pada praktiknya, sekolah dan lembaga pendidikan menjadi sarana mobilisasi politik untuk memperkuat persatuan nasional sekaligus memperkenalkan gagasan-

Daftar Pustaka

- Arifin, Z. (2022). *Kebijakan pendidikan nasional dan tantangan reformasi pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar analisis kebijakan publik* (Edisi kedua). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fathurrohman, M. (2019). *Manajemen pendidikan Islam berbasis mutu*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Hasbullah. (2015). *Dasar-dasar ilmu pendidikan* (Edisi revisi). Jakarta: Rajawali Pers.
- Mulyasa, E. (2018). *Manajemen dan kepemimpinan kepala sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nasution, S. (2011). *Sejarah pendidikan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Prasetyo, M. A., & Widodo, H. (2021). Transformasi kebijakan pendidikan di era digital dan implikasinya terhadap mutu pendidikan nasional. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 9(2), 115–126.
- Suryadi, A. (2020). *Pendidikan Indonesia menuju 2025: Problematika dan strategi pembangunan pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Tilaar, H. A. R. (2012). *Perubahan sosial dan pendidikan: Pengantar pedagogik transformatif untuk Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wahyudin, D. (2021). Desentralisasi pendidikan dan tantangan manajemen pendidikan di Indonesia. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 28(1), 45–58.

PROFIL PENULIS




Luluk Masruroh, S.Si., M.Pd.

Penulis merupakan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama yang telah mengabdikan lebih dari 18 tahun dan memiliki pengalaman panjang dalam bidang statistik, pengelolaan data, pengembangan kompetensi sumber daya manusia, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ASN. Dalam perjalanan kariernya, penulis aktif mengembangkan kompetensi profesional melalui berbagai pelatihan dan sertifikasi. Pengalaman tersebut semakin memperkuat kapasitasnya dalam merancang, mengelola, dan mengevaluasi program pelatihan berbasis data.

Pendidikan sarjana ditempuh pada Program Studi Statistika Universitas Diponegoro (UNDIP) dan berhasil diselesaikan pada tahun 2007. Selanjutnya, penulis melanjutkan studi magister pada Program Studi Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Semarang (UNNES) dan lulus pada tahun 2017. Kombinasi keilmuan statistik dan manajemen pendidikan memberikan landasan yang kuat dalam mendukung tugas-tugas profesionalnya, khususnya pada bidang analisis data, evaluasi program, pengembangan pelatihan, dan peningkatan mutu organisasi.

Melalui buku ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, peningkatan kualitas tata kelola organisasi, serta penguatan kompetensi sumber daya manusia dalam menghadapi tantangan era transformasi digital dan perubahan yang semakin dinamis.

Email Penulis: lulukmasruroh84@gmail.com



BAB 6

**ARSITEKTUR KOGNITIF
BARU: MENGINSTITUSIKAN
KODING DAN KECERDASAN
ARTIFISIAL SEBAGAI
EPISENTRUM BUDAYA
PRESTASI DI PENDIDIKAN
MENENGAH**

Dian Milasari, S.Pd., M.Pd.
Universitas Negeri Semarang



Pendahuluan

Implementasi koding dan kecerdasan artifisial (AI) di SMA Negeri 2 Semarang merupakan upaya rekonstruksi pola pikir untuk mengatasi kesenjangan epistemik akibat disrupsi teknologi. Berdasarkan *Grand Theory* Ekologi Sistem dari Urie Bronfenbrenner, transformasi ini menunjukkan bagaimana kebijakan makro di level ekosistem merestrukturisasi interaksi pada level mikrosistem, yakni hubungan instruksional antara guru dan murid. Dalam ekosistem yang menyerupai Modernitas Cair (*Liquid Modernity*) Zygmunt Bauman, sekolah tidak lagi sekadar menjadi *transmitter* informasi, melainkan ruang adaptif yang menanamkan *computational thinking* sebagai navigasi logika.

Koding diposisikan sebagai "bahasa kekuasaan" dalam *The Network Society* Manuel Castells, yang memungkinkan murid bermigrasi dari konsumen pasif menjadi arsitek informasi yang mampu mengelola aliran data global. Penggunaan koding dan kecerdasan artifisial di sini berfungsi sebagai *Augmented Intelligence* dan mitra dialektis yang, menurut Rose Luckin, menciptakan kecerdasan kolaboratif antara intuisi manusia dan efisiensi mesin. Dengan bantuan AI sebagai *scaffolding* digital dalam Zona Pengembangan Proksimal (ZPD) Lev Vygotsky, siswa dapat melampaui keterbatasan kognitif tradisional dan fokus pada pengembangan *Higher Order Thinking Skills* (HOTS) secara inklusif.

Transformasi identitas prestasi ini berakar pada internalisasi Digital Growth Mindset dari Carol Dweck, di mana kegagalan teknis dalam koding (seperti *bug* atau *error*) tidak lagi dipandang sebagai vonis kemampuan, melainkan sebagai data berharga untuk resiliensi kognitif dan iterasi berkelanjutan. Budaya prestasi yang baru ini menempatkan martabat intelektual siswa pada kemampuannya mendesain solusi, bukan sekadar menghafal algoritma. Keberhasilan perubahan arsitektur mental ini dikatalisasi oleh kepemimpinan kepala sekolah sebagai *Learner-in-Chief*. Mengacu pada Teori Kepemimpinan Instruksional Philip Hallinger, keterlibatan aktif pemimpin dalam meruntuhkan sekat birokrasi di laboratorium koding menciptakan rasa aman psikologis yang menstimulasi

keberanian bereksperimen. Secara filosofis, integrasi teknologi ini adalah manifestasi keadilan sosial yang selaras dengan target SDGs 4 dan 9, yang bertujuan melakukan redistribusi modal budaya dan menghapus kesenjangan talenta digital. Pada akhirnya, visi ini menyiapkan lulusan sebagai "*Learners without Borders*" yang memiliki kedaulatan berpikir dan fleksibilitas metakognitif untuk tetap relevan serta beretika di era *Artificial General Intelligence* (AGI) mendatang.

Koding dan *Computational Thinking* sebagai Navigasi Logika

Transformasi struktur sosial di era digital ini selaras dengan visi Modernitas Cair (*Liquid Modernity*). Zygmunt Bauman yang menuntut elastisitas intelektual tinggi dalam menghadapi arus perubahan yang konstan. Hal ini diperkuat oleh pandangan Manuel Castells dalam *The Network Society* yang menegaskan bahwa kekuasaan modern terletak pada penguasaan kode dan aliran informasi dalam jaringan global.

Di SMA Negeri 2 Semarang, koding diposisikan sebagai alat navigasi bagi murid untuk bermigrasi dari pengguna pasif menjadi aktor yang mampu mendesain logika mandiri melalui bantuan kecerdasan artifisial. Luckin (2018) memperkuat paradigma ini melalui tesis kecerdasan kolaboratif, di mana teknologi melengkapi intuisi manusia dengan efisiensi mesin secara harmonis. Sebagai pengembangannya, fenomena ini merefleksikan konsep *Human-Centered AI* dari Shneiderman (2022), yang menekankan bahwa teknologi harus meningkatkan martabat manusia daripada menggantikannya. Sinergi ini memastikan bahwa kecanggihan algoritma tetap berada di bawah kendali kreativitas manusia, sehingga teknologi berfungsi sebagai instrumen perluasan kapasitas intelektual yang bermartabat.

Proses integrasi ini memicu metamorfosis mental yang dramatis di mana laboratorium *coding* berubah menjadi ruang publik dialektis bagi murid untuk berfokus pada optimasi logika dan kemandirian belajar (*self-regulated learning*). Pergeseran ini menunjukkan bahwa siswa tidak lagi terjebak pada pencarian jawaban tunggal, melainkan lebih menghargai keunikan proses dalam pemecahan masalah.

Daftar Pustaka

- Bauman, Z. (2000). *Liquid Modernity (Modernitas Cair)*. Cambridge: Polity Press.
- Bronfenbrenner, U. (1979). *The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design*. Cambridge: Harvard University Press.
- Castells, M. (1996). *The Rise of the Network Society*. Oxford: Blackwell.
- Dweck, C. (2016). *Mindset: The New Psychology of Success (Teori Growth Mindset)*. New York: Ballantine Books.
- Fullan, M. (2014). *The principal: Three Keys to Maximizing Impact*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Hallinger, P. (2003). *Instructional Leadership Theory*. Dalam: *Second International Handbook of Educational Leadership and Administration*.
- Luckin, R. (2018). *Machine Learning and Human Intelligence: The Future of Education in the 21st Century*. London: UCL Press.
- Russell, S. J., & Norvig, P. (2020). *Artificial intelligence: A Modern Approach. (4th Edition)*. Pearson.
- Selwyn, N. (2019). *Should Robots Replace Teachers? AI and the Future of Education*. Cambridge: Polity Press.
- Sheninger, E. (2014). *Digital Leadership: Changing Paradigms for Changing Times*. Thousand Oaks: Corwin Press.
- Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Cambridge: Harvard University Press.
- Williamson, B. (2024). *Policy networks, performance metrics and platform data: The digital restructuring of education*. *Journal of Education Policy*.
- Zawacki-Richter, O., et al. (2019). *Systematic review of research on artificial intelligence applications in higher education – where are the educators?* *International Journal of Educational Technology in Higher Education*.
- Zhao, Y. (2022). *Learners without Borders*. Thousand Oaks: Corwin.

PROFIL PENULIS




Dian Milasari, S.Pd., M.Pd.

Penulis memandang institusi pendidikan bukan sekadar ruang transformatif kognitif, melainkan sebuah ekosistem organisasional yang hidup, dinamis, dan visioner. Bagi guru yang sekaligus bertugas sebagai Kepala SMA Negeri 2 Semarang ini, sekolah adalah miniatur peradaban; tempat menyemai benih-benih kepemimpinan masa depan yang adaptif terhadap disrupsi zaman, namun tetap berakar kuat pada nilai-nilai kemanusiaan. Ketertarikannya yang mendalam pada dunia organisasi tidak hanya tercermin dari kepiawaiannya menahkodai manajemen sekolah, tetapi juga dari kemampuannya merajut sinergi, memantik ruang-ruang kolaborasi demokratis, dan menumbuhkan budaya kerja berbasis empati demi mencetak generasi emas yang bernalar kritis serta berkarakter luhur.

Visi tersebut lahir dan terus dirawat dari ruang kontemplasi pribadinya yang multitalenta, sederhana, namun elegan, di mana aktivitas membaca dan menulis bukan lagi sekadar hobi, melainkan instrumen untuk khazanah pikir dan menuangkan gagasan. Menariknya, kedalaman intelektual ini berpadu harmonis dengan filosofi berkebun yang beliau jalani di sela kesibukan birokrasi. Bagi beliau, mendidik siswa memiliki analogi yang serupa dengan merawat tanaman: menuntut kesabaran ekstra dan ketulusan. Keindahan kelopak bunga yang mekar senantiasa mengingatkan beliau akan senyum para siswa yang berhasil menemukan talenta terbaiknya setelah dirawat dengan kasih sayang. Oleh karenanya, Dian Milasari tidak hanya berkarya dengan instruksi, melainkan menginspirasi secara komprehensif antara ketajaman literasi, kesenangan berorganisasi, dan kelembutan jiwa yang membumi.

Email penulis: dmilasari2025@gmail.com



BAB 7
PENDIDIKAN VOKASI
DAN REVITALISASI SMK:
TRANSFORMASI SISTEM
PENDIDIKAN KEJURUAN
MENUJU SUMBER DAYA
MANUSIA YANG BERDAYA
SAING

Moh. Uyub, S.Pd., M.Pd.
Universitas Negeri Semarang



Pendidikan vokasi dan revitalisasi SMK sangat terkait dengan kondisi pendidikan kejuruan Indonesia saat ini. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan topik ini. UNESCO-UNEVOC (2013) menyatakan bahwa pendidikan vokasi memainkan peran penting dalam pembentukan sumber daya manusia yang kompetitif di era global karena menghubungkan dunia pendidikan dengan dunia kerja. Lulusan SMK menyumbang tingkat pengangguran tertinggi dibandingkan dengan jenjang pendidikan lainnya, menurut data yang dikumpulkan oleh *National Center for Statistics*/(Badan Pusat Statistik (BPS), (2016). Ini menunjukkan bahwa topik ini penting. Karena paradoks ini, pemerintah merasa perlu melakukan perubahan besar-besaran yang disebut Revitalisasi SMK. Presentasi ini akan mempelajari apa itu pendidikan vokasi, bagaimana sejarahnya berjalan, dan apa yang berubah setelah kebijakan revitalisasi diterapkan, sebagaimana dikaji oleh (Mastura Minabari, 2023) dalam konteks dinamika pendidikan vokasi kontemporer di Indonesia.

Konsep dan Tujuan Pendidikan Vokasi

Undang-Undang RI Nomor 20 (2003) tentang Sistem Pendidikan Nasional mendefinisikan pendidikan kejuruan sebagai pendidikan yang mempersiapkan siswa terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu, berwirausaha, atau melanjutkan pendidikan tinggi kejuruan. Ini membedakannya dari jalur pendidikan umum, yang berpusat pada penguasaan ilmu pengetahuan teoritis. Dalam pendidikan vokasi, keterampilan praktis adalah inti dari proses pembelajaran. Dalam pendidikan vokasi, teori dan praktik diintegrasikan secara proporsional dan kontekstual. Ini berbeda dengan bidang akademik di mana abstraksi konseptual adalah ciri khas. Misalnya, seseorang yang masuk ke SMK dengan jurusan Teknik Pemesinan akan belajar bukan hanya fisika dan matematika tetapi juga bagaimana menggunakan mesin bubut, mesin frais, dan peralatan manufaktur modern lainnya. Menurut *International Labour Organization* (ILO), (2017).

Pendidikan vokasi memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan sumber daya manusia karena dapat menghasilkan tenaga kerja yang siap untuk memasuki dunia kerja. Peserta didik

lebih mudah memahami penerapan ilmu secara langsung di lingkungan industri dan masyarakat berkat pendekatan pembelajaran yang menekankan pengalaman praktik. Akibatnya, pendidikan vokasi sering dianggap sebagai jalur antara dunia kerja dan dunia akademik. Selain membekali siswa dengan kemampuan teknis, pendidikan vokasi juga mengajarkan mereka cara berpikir kritis, bekerja sama dalam tim, berkomunikasi, dan menjadi profesional, semua kualitas yang sangat penting dalam dunia kerja modern.

Dengan perkembangan teknologi dan revolusi industri 4.0, pendidikan vokasi harus terus disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja yang berubah. Semakin banyak lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) dan pendidikan vokasi lainnya membutuhkan keterampilan yang berkaitan dengan teknologi digital, otomatisasi, dan penggunaan perangkat industri kontemporer. Oleh karena itu, untuk tetap relevan dengan perkembangan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), lembaga pendidikan vokasi harus terus memperbarui kurikulum, sarana praktik, dan kompetensi guru. Pendidikan vokasi yang baik diharapkan menghasilkan lulusan yang mahir, produktif, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.

Periodisasi Pendidikan Vokasi SMK di Indonesia

Memahami keadaan SMK saat ini diperlukan untuk memahami sejarah pendidikan kejuruan Indonesia yang lebih dari 70 tahun. Pendidikan vokasi mengalami evolusi dan kemajuan sepanjang sejarah, yang mencerminkan perubahan politik, ekonomi, dan sosial di setiap abad. Suyadi et al. (2022) membagi periodisasi ini ke dalam tujuh babak besar, dengan dampak masing-masing pada pendidikan kejuruan di seluruh negara yang berbeda.

Tabel 7.1: Periodisasi Perkembangan Pendidikan Vokasi SMK di Indonesia

Periode	Perkembangan Utama
Era Orde Lama (1960–1968)	Perluasan sekolah kejuruan (STM, SMEA, SKKA, SPG) dengan penekanan keterampilan teknis sesuai program pembangunan nasional.

Daftar Pustaka

- Allen, E. R. (2016). *Analysis Of Trends And Challenges In The Indonesian Labor Market*. www.adb.org;
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2016). *Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2016*. BPS.
- BAPPENAS. (2018). *Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Kajian Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 2018*. Bappenas.
- Barber dan Maourshed. (2007). *How The World's Best_Performing School Systems Come Out on Top*. Mc Kinsey & Company.
- Disas, E. P. (2018). *Link and Match sebagai Kebijakan Pendidikan Kejuruan Link and Match as a Vocational Education Policy*. Indonesia. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Hasan, R., Nuthihar, R., Hanif, H., & Juanda, J. (2023). Manajemen Kemitraan Perguruan Tinggi Vokasi dengan DUDI untuk Meningkatkan Keterserapan Lulusan dalam Dunia Kerja di Kabupaten Aceh Barat. *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*, 9(1), 101–119. <https://doi.org/10.26618/kjap.v9i1.9114>
- Instruksi Presiden No.9. (2016). *Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2016 Tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Manusia Indonesia*.
- International Labour Organization (ILO). (2017). *Skills for Employability in Indonesia: Building a demand_Driven Training System*.
- Kemdikbud. (1993). *Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran, Izin Pendirian/ Penyelenggaraan SMK*.
- Kemdikbud. (2017). *Statistik Kebudayaan 2017. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Sekretariat Jenderal. Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan*.
- Kemendikbud RI. (2016). *Statistik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 2015/2016 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Sekretariat Jenderal. Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan*.
- Leithwood, K., Louis, K. S., Anderson, S., & Wahlstrom, K. (2004).

Ontario Institute for Studies in Education Commissioned by Learning from Leadership Project.

Mastura Minabari, D. (2023). *Dinamika Pendidikan Menengah Kejuruan di Indonesia(Refleksi Empiris).*Purwodadi - Jateng. CV.Sarnu Untung.

Menteri Pendidikan, P., & Kebudayaan, D. (2020). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 50 Tahun 2020 tentang Praktek Kerja Lapangan bagi Peserta Didik.*

OECD. (2015). *Education policy outlook 2015 :Indonesia.* OECD Publishing. OECD.

Peraturan Pemerintah No. 23. (2004). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.*

Permendikbud. (2018). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 15 Tahun 2018 , Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah.*

Undang-Undang RI Nomor 20. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasiona.*


UNESCO-UNEVOC. (2013). *Revisiting global trends in TVET: Reflections on theory and practice.* UNESCO-UNEVOC International Centre.

PROFIL PENULIS



Moh. Uyub, S.Pd., M.Pd.

Penulis adalah Kepala SMP Negeri 3 Pangkah, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) Pendidikan Bahasa Inggris, kemudian melanjutkan ke jenjang Magister (S2) Pedagogi di Universitas Pancasakti Tegal. Perpaduan kompetensi linguistik dan pedagogis tersebut membentuk fondasi yang kuat dalam pengelolaan pembelajaran yang efektif dan bermutu. Ketertarikan penulis pada pendidikan vokasi berangkat dari keyakinan bahwa penguatan karakter dan kompetensi peserta didik sejak jenjang dasar merupakan pondasi utama keberhasilan pendidikan kejuruan. Melalui book chapter berjudul "Pendidikan Vokasi dan Revitalisasi SMK: Transformasi Sistem Pendidikan Kejuruan Menuju Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing", penulis menyumbangkan perspektif dan gagasan konstruktif mengenai arah pengembangan pendidikan vokasi Indonesia, khususnya dalam meningkatkan relevansi SMK terhadap kebutuhan dunia kerja dan pembangunan nasional. Email Penulis: mohuyub13@students.unnes.ac.id



BAB 8

**PENDIDIKAN FORMAL DAN
NONFORMAL: KESETARAAN
AKSES DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT SEBAGAI
PILAR TRANSFORMASI
SOSIAL**

Ir. Bambang Dwi Wijayanto, M.M., IPU, CRGP.
Universitas Negeri Semarang



Pendahuluan

Pendidikan merupakan hak dasar manusia yang dijamin oleh konstitusi dan berbagai instrumen hak asasi manusia internasional. Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan (Republik Indonesia, 1945). Namun demikian, realitas lapangan menunjukkan bahwa pemenuhan hak tersebut masih jauh dari ideal, terutama bagi kelompok-kelompok marginal yang menghadapi berbagai hambatan struktural.

Data (Badan Pusat Statistik, 2023) mengungkapkan fakta yang memprihatinkan: sekitar 2,9 juta anak usia sekolah di Indonesia masih tidak mengenyam pendidikan formal. Angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi pun belum merata secara geografis, dengan kesenjangan signifikan antara kawasan perkotaan dan pedesaan, antara Pulau Jawa dan daerah terpencil di Indonesia bagian timur. Rata-rata lama sekolah penduduk dewasa Indonesia baru mencapai 8,7 tahun masih jauh dari target pendidikan menengah universal.

Di tengah kondisi ini, pendidikan nonformal hadir sebagai sistem alternatif yang mampu menjangkau kelompok-kelompok yang tidak terlayani oleh sistem pendidikan formal. Program kesetaraan Paket A, B, dan C; kursus dan pelatihan keterampilan serta berbagai inisiatif pendidikan berbasis komunitas telah membuktikan kapasitasnya dalam memberdayakan jutaan warga yang sebelumnya terpinggirkan dari sistem. Namun ironisnya, pendidikan nonformal masih sering dipandang sebagai sistem pendidikan kelas dua, memperoleh porsi anggaran yang tidak proporsional, legitimasi sosial yang lebih rendah, dan dukungan kelembagaan yang minimal.

Ketegangan antara dua sistem pendidikan ini mencerminkan persoalan yang lebih mendasar bagaimana negara memahami dan mendistribusikan hak atas pendidikan. Apabila pendidikan formal diprioritaskan semata tanpa memperhatikan hambatan struktural yang dialami oleh kelompok rentan, maka sistem pendidikan justru berpotensi memperkuat ketimpangan sosial yang ada, alih-alih mengurangnya. Sebaliknya, apabila pendidikan nonformal dibiarkan berkembang tanpa dukungan sistematis dan integrasinya dengan sistem formal, maka jutaan warga akan tetap terjebak dalam siklus kemiskinan dan eksklusi sosial.

Kajian ini hadir sebagai upaya untuk menganalisis secara kritis dinamika antara pendidikan formal dan nonformal dalam kerangka kesetaraan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan memadukan perspektif analisis sosial-struktural dan tinjauan kebijakan implementatif, laporan ini berupaya memberikan gambaran komprehensif tentang tantangan yang dihadapi serta solusi konkret yang dapat diterapkan.

Potret Kesenjangan Pendidikan di Indonesia

Indonesia telah mencapai kemajuan signifikan dalam perluasan akses pendidikan sejak era reformasi. Angka melek huruf nasional telah melampaui 95%, dan angka partisipasi murni (APM) pendidikan dasar mendekati 95%. Namun di balik angka-angka agregat yang menjanjikan ini, tersembunyi kesenjangan yang tajam dan persisten yang mencerminkan ketimpangan struktural yang lebih luas.

Tabel 8.1: Indikator Kesenjangan Pendidikan di Indonesia

Indikator	Nasional
Angka putus sekolah SMP/ sederajat	0,98%
APK Pendidikan Tinggi	31,45%
Rata-rata lama sekolah	8,77 tahun
Peserta didik usia 5–24 tahun yang pernah mengakses internet	77,46%
Penggunaan internet untuk pembelajaran daring	27,53%
Anak tidak sekolah usia 7–18 tahun	2.922.607 jiwa

Sumber: Badan Pusat Statistik (2023) Badan Pusat Statistik (2024) dan Jatniko (2026), diolah.

Angka-angka ini mencerminkan lebih dari sekadar statistik di balik setiap poin persentase terdapat jutaan narasi individu tentang mimpi yang tertunda, potensi yang tidak terwujud, dan siklus kemiskinan antargenerasi yang terus berputar. Ketimpangan pendidikan bukan fenomena alamiah, melainkan produk dari pilihan-pilihan kebijakan, distribusi sumber daya, dan struktur sosial yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

Daftar Pustaka

- Ainscow, M., Booth, T., & Dyson, A. (2006). Improving Schools, developing Inclusion. In *Improving Schools, developing Inclusion*. Routledge Taylor & Francis Group.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Pendidikan 2023*.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Pendidikan 2024*.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat. (2018). *Profil lansia Provinsi Nusa Tenggara Barat 2018*. BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Bourdieu, P., & C Passeron, J. (1990). *Reproduction in education, society and culture* (2nd ed.). SAGE Publications.
- BPS, Bappenas, UNICEF, & PUSKAPA. (2020). *Pencegahan perkawinan anak: Percepatan yang tidak bisa ditunda*. UNICEF Indonesia.
- Brinkerhoff, W. D., & Crosby, L. B. (2002). *Managing policy reform: Concepts and tools for decision-makers in developing and transitioning countries*. Kumarian Press, Inc.
- Candra, A. (2024). Universitas Telkom dan Jabar Digital Service Buka Program KKNT Desa Digital untuk Tingkatkan Layanan dan Potensi Desa. 2024.
- Coombs, H. P., & Ahmed, M. (1974). *Attacking rural poverty: How non-formal education can help*. Johns Hopkins University Press.
- Freire, P., Ramos, B. M., & Macedo, D. (1970). *Pedagogy of the oppressed*. Herder and Herder.
- Hajer, M., & Wagenaar, H. (2003). *Deliberative policy analysis: Understanding Governance in the Network Society*. Cambridge University Press.
- Jatniko, Y. (2026). *Kemendikdasmen perkuat data anak tidak sekolah*.
- Kabeer, N. (2010). *Gender Equality and Women's Empowerment: A Critical Analysis of the Third Millennium Development Goal 1*. 13(1), 13–24.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2018). *Penduduk buta aksara tahun 2018*. Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan

Kebudayaan.


- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2019). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus nonfisik bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan.*
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2021). *Statistik pendidikan non-formal 2020/2021.*
- Kindervatter, S. (1979). *Nonformal Education as an Empowering Process.*
- Prijono, S. O., Pranarka, M. A. W., & Vidhyandika, M. (1996). *Pemberdayaan.* In O. S. Prijono & A. M. W. Pranarka (Eds.), *Pemberdayaan: Konsep, kebijakan dan implementas.* Centre for Strategic and International Studies.
- Redaksi Kapal Perempuan. (2022). Strategi KAPAL Perempuan Integrasikan GEDSI dalam Program INKLUSI. *Kapalperempuan.Org.*
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.*
- Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.*
- Rogers, A. (2005). *Non-Formal Education Flexible Schooling or Participatory Education?* Springer New York, NY.
- Sen, A. (1999). *Development As Freedom.* Oxford University Press.
- Smith, K. M. (2015). Non-formal education. *The Encyclopaedia of Pedagogy and Informal Education. Infed.Org.*
- UNESCO. (2020). *Global education monitoring report 2020: Inclusion and education.* UNESCO Publishing.
- UNESCO Institute for Lifelong Learning. (2016). *BRAC education programme, Bangladesh.*
- World Bank. (2018). *World development report 2018: Learning to realize education's promise.*

PROFIL PENULIS



Ir. Bambang Dwi Wijayanto, M.M, IPU, CRGP.

Lahir di Banjarmasin pada 14 Desember 1972. Memiliki ketertarikan yang kuat pada bidang konstruksi, pengembangan infrastruktur, manajemen proyek, & transformasi & pengembangan bisnis industri nasional, khususnya dalam sektor konstruksi, engineering, dan material jalan. Riwayat pendidikan dimulai dari Sarjana (S1) Teknik Sipil di Universitas Jayabaya yang diselesaikan pada tahun 1997. Selanjutnya, menempuh pendidikan Magister (S2) bidang Pemasaran di Universitas Mulawarman & lulus pada tahun 2010 dengan predikat sangat memuaskan. Pada tahun 2025, beliau menyelesaikan pendidikan Profesi Insinyur bidang Teknik Sipil di Universitas Gadjah Mada dengan predikat cumlaude. Dalam perjalanan kariernya, Bambang Dwi Wijayanto memiliki pengalaman lebih dari dua dekade di industri konstruksi dan infrastruktur nasional. Pernah menjabat sebagai Manajer Divisi Sipil Umum di PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dengan kontribusi signifikan dalam peningkatan omzet proyek & profitabilitas perusahaan. Kemudian berkembang level direksi di antaranya sebagai Direktur Marketing, Pengembangan Usaha, Operasi & Pemeliharaan di PT Wijaya Karya Rekrayasa Konstruksi, Direktur Utama di PT Wijaya Karya Bitumen, Director of Engineering & Development di PT Waskita Beton Precast Tbk, hingga saat ini Direktur Utama di PT Waskita Karya Infrastruktur. Beliau dikenal aktif dalam pengembangan strategi bisnis, restrukturisasi korporasi, peningkatan kualitas operasional, penguatan tata kelola perusahaan, serta pengembangan industri Aspal Buton sebagai bagian dari upaya hilirisasi dan substitusi impor nasional. Email Penulis : bambangdwiwijayanto@gmail.com



BAB 9

**PERAN DOSEN DALAM
MENINGKATKAN HASIL
BELAJAR MAHASISWA
DI ERA TRANSFORMASI
PENDIDIKAN TINGGI**

Dian Erliyani, S.SiT., M.Si.
Universitas Negeri Semarang



Pendahuluan

Pendidikan tinggi memiliki posisi strategis yang tidak tergantikan dalam membentuk sumber daya manusia yang adaptif, inovatif, berdaya saing global, dan mampu berkontribusi secara bermakna terhadap pembangunan masyarakat. Dalam konteks ini, dosen menempati posisi sentral sebagai aktor utama yang secara langsung menentukan kualitas proses pembelajaran dan derajat capaian akademik mahasiswa. Peran dosen telah mengalami evolusi yang fundamental dari sekadar penyampai informasi dalam paradigma lama, kini dosen dituntut berfungsi sebagai fasilitator pembelajaran yang merancang pengalaman belajar bermakna, mentor akademik yang membimbing perkembangan intelektual dan profesional mahasiswa, pengembang kurikulum yang menjembatani teori dengan kebutuhan dunia kerja, sekaligus mediator pembelajaran berbasis teknologi yang mahir memanfaatkan ekosistem digital secara pedagogis. Transformasi pendidikan di era digital mendorong dosen untuk mengintegrasikan pendekatan pedagogis inovatif yang selaras dengan karakteristik generasi mahasiswa masa kini serta tuntutan dunia kerja yang terus bergerak.

Pergeseran paradigma pembelajaran menjadi semakin nyata dan mendesak pasca pandemi Covid-19 yang secara dramatis mempercepat integrasi teknologi ke dalam sistem pendidikan tinggi secara global. Pembelajaran daring yang diterapkan secara masif ternyata membuka kesadaran kolektif bahwa efektivitas pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh penguasaan konten ajar, melainkan juga oleh kemampuan dosen dalam menciptakan pengalaman belajar yang interaktif, fleksibel, relevan, dan bermakna meskipun disampaikan melalui medium yang berbeda dari ruang kelas konvensional. Zen Munawar et al. (2021) menunjukkan secara empiris bahwa pemanfaatan teknologi digital tidak hanya meningkatkan intensitas interaksi pembelajaran, tetapi juga secara signifikan memperluas aksesibilitas mahasiswa terhadap sumber-sumber belajar yang sebelumnya tidak terjangkau, sehingga menciptakan peluang demokratisasi pengetahuan yang belum pernah ada sebelumnya. Temuan ini menegaskan bahwa dosen yang meleak

teknologi dan mampu mengintegrasikannya secara pedagogis memiliki kapasitas untuk memperluas dampak positif pembelajaran melampaui batas fisik ruang kelas.

Di luar dimensi teknologis, kualitas hubungan interpersonal antara dosen dan mahasiswa terbukti memiliki pengaruh yang tidak kalah signifikan bahkan sering kali lebih menentukan terhadap motivasi dan kualitas hasil belajar mahasiswa. Relasi yang dibangun atas dasar kepercayaan, rasa hormat, dan kepedulian autentik menciptakan iklim belajar yang kondusif dan mendukung perkembangan intelektual mahasiswa secara menyeluruh. Ahiruddin (2023) menjelaskan bahwa strategi pembelajaran berbasis pemecahan masalah kreatif mampu meningkatkan motivasi belajar mahasiswa secara signifikan, sekaligus mendorong keterlibatan aktif dan reflektif dalam setiap fase proses pembelajaran. Temuan tersebut diperkuat oleh Susilawati (2021) yang menegaskan bahwa pendekatan humanistik dalam pendidikan yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek aktif, bukan objek pasif secara efektif mendorong terbentuknya kemandirian belajar, tanggung jawab akademik, dan orientasi belajar yang intrinsik pada diri mahasiswa.

Meskipun demikian, implementasi pembelajaran di pendidikan tinggi masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural yang tidak dapat diabaikan. Sebagian dosen masih bertahan pada pendekatan pembelajaran konvensional yang berorientasi pada ceramah satu arah, sebuah pola yang semakin tidak relevan dengan tuntutan pendidikan abad ke-21. Selain itu, ketimpangan kemampuan literasi digital di antara dosen, keterbatasan kreativitas dalam berinovasi secara pedagogis, dan lemahnya integrasi antara kurikulum perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang menjadi hambatan nyata dalam upaya peningkatan kualitas hasil belajar mahasiswa secara sistemik.

Berdasarkan kondisi dan tantangan tersebut, artikel ini berargumentasi bahwa keberhasilan hasil belajar mahasiswa secara fundamental dipengaruhi oleh kemampuan dosen dalam mengintegrasikan pendekatan pedagogis inovatif, teknologi pendidikan yang bermakna, dan hubungan interpersonal yang otentik secara adaptif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan

Daftar Pustaka

- Ahiruddin, H. S. (2023). Analisis rendahnya motivasi belajar mahasiswa dengan teknik pemecahan masalah kreatif. *Ilma: Jurnal Pendidikan Islam*. <https://doi.org/10.58569/ilma.v2i1.610>
- Al Hadiq, M. F., Ramadhan, G. M., & Rahayu, D. S. (2022). Pengaruh model *project-based learning* terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa SD. *COLLASE (Creative of Learning Students Elementary Education)*, 5(3). <https://doi.org/10.22460/collase.v5i3.10905>
- Fuadi, T. M. (2022). Konsep Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM): Aplikasinya dalam pendidikan biologi. *Prosiding Seminar Nasional Biotik*. <https://doi.org/10.22373/pbio.v9i2.11594>
- Mardiyati, B. D., & Yuniawati, R. (2021). Perbedaan adaptabilitas karier antara mahasiswa yang berlatar belakang SMA dan SMK.
- Munawar, Z., et al. (2021). Pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran di masa pandemi Covid-19.
- Noerbella, D. (2022). Implementasi program kampus mengajar angkatan 2 dalam meningkatkan kompetensi literasi dan numerasi peserta didik. *Jurnal Cakrawala Pendas*, 8(2). <https://doi.org/10.31949/jcp.v8i2.2087>
- Primawanti, E. P., & Ali, H. (2022). Pengaruh teknologi informasi, sistem informasi berbasis web dan knowledge management terhadap kinerja karyawan. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 3(3). <https://doi.org/10.31933/jemsi.v3i3.818>
- Sirajul Fuad Zis, N., Effendi, N., & Roem, E. R. (2021). Perubahan perilaku komunikasi generasi milenial dan generasi Z di era digital. *Satwika: Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial*, 5(1). <https://doi.org/10.22219/satwika.v5i1.15550>
- Susilawati, N. (2021). Merdeka belajar dan kampus merdeka dalam pandangan filsafat pendidikan *humanisme*. *Jurnal Sikola: Jurnal Kajian Pendidikan dan Pembelajaran*, 2(3). <https://doi.org/10.24036/sikola.v2i3.108>
- Wijayanto, A. (2021). Implementasi dan *problematika* Merdeka


- Belajar. OSF Preprints. <https://doi.org/10.31219/osf.io/yshk6>
- Kuh, G. D. (2009). The national survey of *student engagement*: Conceptual and empirical foundations. *New Directions for Institutional Research*, 141, 5–20.
- Tinto, V. (2017). Through the eyes of *students*. *Journal of College Student Retention: Research, Theory & Practice*, 19(3), 254–269. <https://doi.org/10.1177/1521025115621917>
- Freeman, S., et al. (2014). Active *learning* increases student performance in science, engineering, and mathematics. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 111(23), 8410–8415. <https://doi.org/10.1073/pnas.1319030111>
- John Hattie (2009). *Visible Learning*. Routledge.
- Bond, M., et al. (2020). Mapping research in *student engagement* and educational technology. *Educational Technology Research and Development*, 68, 1145–1176. <https://doi.org/10.1007/s11423-019-09769-4>
- Biggs, J., & Tang, C. (2011). *Teaching for quality learning at university* (4th ed.). Open University Press.
- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2020). Contemporary Educational Psychology, 61, 101860. <https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2020.101860>

PROFIL PENULIS

Dian Erliyani, S.SiT., M.Si.

Penulis lahir di Sidoarjo pada 12 Oktober 1979. Ia meniti karier akademiknya di dunia maritim setelah menyelesaikan pendidikan Diploma IV (DIV) Nautika pada tahun 2002. Dedikasinya terhadap dunia pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan mendorongnya untuk melanjutkan studi ke jenjang Magister (S2) di Universitas Stikubank (Unisbank) Semarang, yang berhasil diselesaikannya dengan baik pada tahun 2013. Saat ini, ia aktif mengabdikan diri sebagai Dosen di Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang, fokus mengajar dan melakukan penelitian di bidang pelayaran dan keselamatan transportasi laut. Buku ini merupakan salah satu bentuk kontribusi pemikirannya dalam memperkaya literasi akademik di Indonesia. Penulis dapat dihubungi melalui email institusi resmi atau *platform* komunikasi profesional lainnya.

Email Penulis : dianerliyani@students.unnes.ac.id



BAB 10

**KRITIK KEBIJAKAN
PENDIDIKAN TINGGI:
KRISIS STRUKTURAL
DAN STRATEGI
TRANSFORMASI MENUJU
INDONESIA EMAS 2045**

Radini Sinta, S.T., M.Kom.
Universitas Negeri Semarang



Pendahuluan

Pendidikan tinggi di Indonesia menghadapi krisis struktural yang kompleks. Kebijakan seperti UU No. 12/2012 dan Peraturan No. 39/2025 bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas, tetapi implementasinya telah menciptakan masalah baru: komersialisasi, peningkatan beban administratif bagi dosen, risiko penutupan program ilmu dasar, dan akses yang tidak merata bagi kelompok marjinal. Akibatnya, peran universitas sebagai penggerak peradaban dan mobilitas sosial secara bertahap runtuh.

Berdasarkan data, tingkat partisipasi bruto (PPN) Indonesia hanya 35%, jauh lebih rendah daripada tingkat partisipasi Malaysia sebesar 45% dan Singapura sebesar 70%. Produktivitas penelitian nasional rendah, dengan Indonesia terjebak dalam perangkap pendapatan menengah dan hanya memiliki 0,3 paten untuk setiap juta orang (dibandingkan dengan Korea Selatan yang memiliki 4.500 paten).

Bab ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis kebijakan, menggunakan data sekunder dari dokumen, laporan peringkat global, Biro Pusat Statistik, dan Kementerian Pendidikan Tinggi. Analisis dilakukan dalam empat langkah: mengidentifikasi isu-isu kritis, mengkategorikan dampak, membandingkan kebijakan dengan realitas, dan merumuskan strategi. Diskusi mencakup krisis struktural seperti komersialisasi, neoliberalisme atau Manajemen Publik Baru, pengetahuan dasar, inklusivitas, kesenjangan digital, dan paradoks peringkat global. Bab ini diakhiri dengan strategi transformasi tiga pilar yang berfokus pada kemitraan regional, advokasi substansi ilmiah dan inklusivitas, serta kampus yang berdampak, semuanya diuraikan dalam peta jalan kebijakan untuk tahun 2024–2029.

Filosofi dan Fondasi Hukum Pendidikan Tinggi

Secara filosofis, pendidikan tinggi pada dasarnya adalah investasi publik, bukan produk yang dapat dibeli dan dijual di pasar bebas. Hal ini jelas tercermin dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang mewajibkan universitas untuk

membina komunitas akademik yang inovatif dan kooperatif, mengembangkan ilmu pengetahuan sambil menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dan menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif untuk kepentingan dan kemakmuran bangsa (Republik Indonesia, 2012). Pasal 4 undang-undang tersebut dengan jelas menyatakan bahwa pendidikan tinggi diselenggarakan berdasarkan prinsip keadilan, demokrasi, dan nondiskriminasi, sambil menghormati hak asasi manusia, nilai-nilai agama, nilai-nilai budaya, dan keberagaman bangsa (Republik Indonesia, 2012).

Tridharma Pendidikan Tinggi, yang meliputi pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (Purwanto, 2021). Ketiga pilar ini harus bekerja sama secara harmonis karena penelitian tanpa pengabdian masyarakat akan menjadi menara gading yang tidak membantu masyarakat, sementara pengabdian masyarakat tanpa penelitian akan kekurangan landasan ilmiah yang kuat. Hal ini sejalan dengan pandangan para ahli pendidikan yang percaya bahwa perguruan tinggi memiliki kewajiban moral untuk secara langsung berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat (McCarthy dkk., 2023). Lebih lanjut, Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Nasional menekankan bahwa sistem penjaminan mutu di pendidikan tinggi harus berfokus pada peningkatan mutu berkelanjutan yang berdampak positif pada masyarakat luas (Kementerian Pendidikan Tinggi, 2025).

Dari Publik ke Komoditas

Sayangnya, dalam kenyataan, telah terjadi pergeseran cara pandang akibat diterapkannya Manajemen Publik Baru (*New Public Management/NPM*) yang menuntut universitas beroperasi layaknya perusahaan (Berkovich & Hassan, 2023). Pendekatan NPM yang berasal dari sektor swasta ini kemudian diterapkan begitu saja ke sektor publik tanpa mempertimbangkan karakteristik unik dan nilai-nilai fundamental yang membedakannya (Escobar et al., 2023). Dalam cara pandang lama, pendidikan dilihat sebagai produk yang bertujuan mencapai sasaran administratif, seperti perubahan status Satuan

Daftar Pustaka

- Arikunto, S. (2021). Dasar-dasar evaluasi pendidikan (3rd ed.). Bumi Aksara.
- Berkovich, I., & Hassan, T. (2023). Principals' digital transformational leadership, teachers' commitment, and school effectiveness. *Education Inquiry*, 14(2), 177-194. <https://doi.org/10.1080/20004508.2023.2173705>
- BPS (Badan Pusat Statistik). (2024). Statistik Pendidikan Tinggi Indonesia 2024. BPS.
- Escobar, F., Almeida, W. H. C., & Varajao, J. (2023). Digital transformation success in the public sector: A systematic literature review of cases, processes, and success factors. *Information Polity*, 28(1), 1-24. <https://doi.org/10.3233/IP-211518>
- Grajek, S. (2019). The 2019 EDUCAUSE Horizon Report. EDUCAUSE.
- Kemendikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan). (2013). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Uang Kuliah Tunggal. Kemendikbud.
- Kementerian Pendidikan Tinggi. (2024). Laporan Kinerja Pendidikan Tinggi Indonesia 2024. Kementerian Pendidikan Tinggi.
- Kementerian Pendidikan Tinggi. (2025). Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Nasional. Kementerian Pendidikan Tinggi.
- McCarthy, A. M., Maor, D., McConney, A., & Cavanaugh, C. (2023). Digital transformation in education: Critical components for leaders of system change. *Social Sciences & Humanities Open*, 8(1), 100479. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2023.100479>
- Purwanto, N. (2021). Administrasi dan supervisi pendidikan. Remaja Rosdakarya.
- QS (Quacquarelli Symonds). (2025). QS World University Rankings 2025. QS.
- Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Lembaran Negara RI.

Sugiyono. (2022). Metode penelitian dan pengembangan (Research and Development/R&D). Alfabeta.

THE (Times Higher Education). (2024). THE World University Rankings 2024. THE.

Wahyuni, T., & Tjala, A. (2023). Measurement instruments for the digital transformation in schools. *International Journal of Business, Law, and Education*, 4(1), 41-46.
<https://doi.org/10.56442/ijble.v4i1.109>

World Bank. (2024). World Development Report 2024: The Middle- Income

PROFIL PENULIS




Radini Sinta, S.T., M.Kom.

Ketertarikan penulis di bidang manajemen pendidikan dan administrasi pendidikan mulai muncul selama masa pendidikan tinggi. Hal ini mendorong penulis untuk melanjutkan studi di Program Studi Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Semarang (UNNES), di mana ia berhasil menyelesaikan gelar Sarjana (S1) pada tahun 2003. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikannya ke tingkat Magister (S2) di Program Studi Magister Sistem Informasi Universitas Diponegoro (UNDIP) dan meraih gelar tersebut pada tahun 2009.

Saat ini, penulis bekerja sebagai Sekretaris Pimpinan di Universitas Negeri Semarang. Di samping itu, ia juga aktif sebagai mahasiswa Program Studi Doktor Manajemen Pendidikan di Sekolah Pascasarjana UNNES. Penulis memiliki keahlian dalam manajemen sumber daya manusia, administrasi pendidikan, serta transformasi digital dalam konteks perguruan tinggi. Dalam upaya mengembangkan karier sebagai akademisi dan profesional, penulis terlibat dalam berbagai aktivitas Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Selain berperan aktif sebagai peneliti, penulis juga terlibat dalam publikasi ilmiah melalui jurnal dan kegiatan seminar baik nasional maupun internasional. Ia juga berkontribusi dalam pengabdian kepada masyarakat melalui pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan terkait administrasi perkantoran, manajemen pendidikan, serta pengelolaan arsip digital. Dengan pengalaman tersebut, penulis berharap dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.


Email penulis: sintadini@mail.unnes.ac.id



BAB 11

**EVALUASI KEBIJAKAN
PENDIDIKAN RAMAH ANAK,
KESETARAAN GENDER, DAN
INKLUSI DISABILITAS DALAM
PERSPEKTIF PIERRE
BOURDIEU: ANTARA
IDEALITAS KEBIJAKAN DAN
REALITAS HABITUS
INSTITUSIONAL**

Edi Kuhen, A.Md.IP, S.H., M.H.
Universitas Negeri Semarang



Pendahuluan

Evolusi paradigma pendidikan modern menuntut rekonstruksi fungsi sekolah, tidak lagi sebatas koridor alih pengetahuan (*transfer of knowledge*), melainkan sebagai episentrum perlindungan hak asasi yang berkeadilan. Kehadiran regulasi yang mengintegrasikan aspek ramah anak, responsivitas gender, dan inklusivitas disabilitas merupakan ikhtiar struktural dalam memotong mata rantai diskriminasi di lingkungan akademik. Namun, dalam perjalanannya, muncul diskrepansi tajam antara regulasi normatif (*das Sollen*) dan fakta sosiologis di lapangan (*das Sein*).

Dalam perspektif Pierre Bourdieu, sekolah adalah sebuah *Field* (Ranah) di mana berbagai modal dipertaruhkan (Mansur & Hakim, 2026). Masalah utama saat ini berasal dari ketimpangan modal yaitu kurangnya dukungan modal ekonomi untuk fasilitas disabilitas dan belum terbentuknya habitus pendidik yang sensitif gender. Akibatnya, sekolah terjebak dalam "Pragmatic Habitus", di mana status "Ramah Anak" atau "Inklusi" hanya menjadi label administratif untuk memenuhi syarat regulasi, tanpa diiringi transformasi *Teaching Modal* (kapasitas guru) dan *Field Modal* (infrastruktur aksesibel). Kontradiksi antara akumulasi modal simbolik sekolah dan devaluasi kualitas pedagogik inklusif menjadi celah literatur yang akan dibedah dalam artikel ini.

Pergeseran Esensi: Menuju Pendidikan *Humanis*

Perubahan menuju pendidikan ramah anak, kesetaraan gender, dan inklusi disabilitas bukan sekadar perubahan superfisial seperti penggantian label atau pemasangan spanduk di gerbang sekolah. Secara ontologis, ini merupakan transformasi radikal dalam memaknai hakikat eksistensi lembaga pendidikan. Esensi dasar sekolah mengalami pergeseran paradigma secara fundamental, yaitu dari yang semula dipandang sebagai ruang mekanistik alih pengetahuan (*transfer of knowledge*) konvensional, kini harus diresmikan sebagai ruang emansipatoris untuk pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) (Tintingon dkk., 2023).

Menurut perspektif *humanis* ini, institusi pendidikan dipaksa untuk merombak cara pandang mereka terhadap peserta didik. Siswa tidak boleh lagi dipandang sebagai subjek instruksional yang pasif atau dalam istilah Paulo Freire dikenal sebagai wadah kosong yang siap diisi secara searah, melainkan harus diposisikan sebagai individu yang merdeka, berdaulat, memiliki hak atas rasa aman, keadilan, dan agensi penuh atas dirinya. Sekolah dituntut bertransformasi menjadi sebuah ekosistem sosial di mana semua manusia, tanpa terkecuali, dihargai dengan derajat martabat yang setara serta dibersihkan dari segala bentuk diskriminasi struktural.

Apabila dibedah menggunakan kacamata sosiologi Pierre Bourdieu, pergeseran esensi menuju pendidikan *humanis* ini tidak akan pernah tercapai selama sekolah masih membiarkan terjadinya ketimpangan kepemilikan modal (*capital*) dan kekakuan ranah (*field*) (Tantangan Kontemporer Penulis & Thamrin Ahmed Fernanda Desky Noer Chalifah Ramadhany Atma Ras Fritz Hotman S Damanik Oman Sukmana Zulkifli Abdullah Dimas Ario Sumilih Nurul Kamaliah Umasangaji, 2025). Integrasi pendidikan ramah anak, kesetaraan gender, dan inklusi disabilitas secara substansial menuntut adanya perombakan triadik sosiologis berikut:

1. Dekonstruksi Ranah (Field) Akademik yang Kognitif-Sentris
2. Redefini status Siswa: Dari Objek Dominasi Menjadi Rights-Bearer
3. Pemutusan Rantai Kekerasan Simbolik (*Symbolic Violence*)

Pendidikan *humanis* menuntut sekolah untuk peka terhadap penindasan simbolik ini. Lembaga pendidikan harus secara sadar menghentikan reproduksi ketimpangan tersebut dengan cara membangun kesadaran kritis bagi seluruh warga sekolah.

Idealitas Kebijakan (*Das Sollen*)

Secara normatif, pemerintah merancang kebijakan sekolah inklusi, ramah anak, dan responsif gender dengan visi ideal untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang komprehensif, emansipatoris, dan berkeadilan sosial. Dalam konseptualisasi sosiologi Pierre Bourdieu, kebijakan publik pada dasarnya merupakan intervensi struktural yang dirancang oleh negara selaku pemegang otoritas tertinggi untuk mengatur ulang "aturan main" (*rules of the game*) di dalam Ranah (*Field*) pendidikan. Regulasi normatif ini

Daftar Pustaka

- Al Baqi, S. (2024). Pemetaan Profil Anak Berkebutuhan Khusus di PAUD dan Implikasinya dalam Pendekatan Child-Centered Learning. *Nak-Kanak: Journal of Child Research*, 1(4), 165–180. <https://doi.org/10.21107/njcr.v1i4.78>
- Apolinaris, T., Jurnal, S. *, & Sosiologi, A. (2024). *KETIDAKADILAN SUBSTANSIAL DAN KEKERASAN SIMBOLIK DALAM PROBLEM MARGINALISASI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI SURAKARTA*.
- Dwi Rahmadania Salmon, S., Rusdiyanto U Puluhulawa, M., & Taufiq Zulfikar Sarson, M. (2025). Implementasi Kebijakan Anti Bullying dalam Mewujudkan Sekolah Ramah Anak di Kota Gorontalo. *YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan*, 3(1), 36–44. <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v3i2.1735>
- Herianto, E., Jahiban, M., & Dahlan, D. (2020). Pola Perlindungan Anak dalam Dimensi Sekolah Ramah Anak di Sekolah/Madrasah Kota Mataram. *JURNAL SOSIAL EKONOMI DAN HUMANIORA*, 6(2), 179–191. <https://doi.org/10.29303/jseh.v6i2.94>
- Hilalludin, H., Sugari, D., Mustakfibillah, M., Dwi Maryani, E., Alma Ata Yogyakarta, U., & Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani Yogyakarta, S. (2025). Peran Modal Sosial dalam Membangun Ketahanan Masyarakat pada Era Post-Pandemi. Dalam *Tahun* (Vol. 1, Nomor 2).
- Maharani, N., Khoirunnisa, N., & Putri, S. P. (2024). ANALISIS MASALAH KESENJANGAN SOSIAL DI SEKOLAH DASAR. *PARADIGM : Journal Of Multidisciplinary Research and Innovation*, 2(01), 1–16. <https://doi.org/10.62668/paradigm.v2i01.1053>
- Mansur, M., & Hakim, D. (2026). *Analisis Peran Modalitas Bourdieu dalam Membentuk Identitas Merek (Brand Identity) Sekolah*. 9(1). <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/dirasah>
- Mohulaingo, R., Pomalingo, S., Halidu, S., Cuga, C., Guru, P., & Dasar, S. (2025). *MENGURAI KEKERASAN SIMBOLIK DIBALIK SERAGAM SEKOLAH DI SEKOLAH DASAR : (PANDANGAN PIERRE BOURDIEU TENTANG HABITUS DALAM PENDIDIKAN)*. 2(3), 1474–1487. <https://doi.org/10.62335>

- Penulis, I., Kusuma, A., Islam, U., Sultan, N., Banten, M. H., & Artikel, I. (2025). *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH) Representasi Perempuan dan Kekerasan Simbolik dalam Film "Before, Nowandthen (NANA)" Karya Kamila Andini: Analisis Semiotika Roland Barthes*. 5(2).
<http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh><https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>
- Rahmaulidayani, A. R., Supriyanto, T., & Purnomo, S. H. (2026). *BENTUK SIMBOLIK KEKERASAN GARUDA PUTIH DALAM NOVEL GARUDA PUTIH KARYA SUPARTO BRATA (KAJIAN SOSIOLOGI SASTRA PIERRE BOURDIEU)* (Vol. 08, Nomor 02).
- Sadiyah, S., Nurmaulidah, D., Komara, E., Komara, N., & Helmawati, H. (2025). Evaluasi Kritis Sistem Pendidikan Nasional: Perspektif Filosofis dan Sosiologis. *Paedagogie*, 20(2), 73–86.
<https://doi.org/10.31603/paedagogie.v20i2.14139>
- Tantangan Kontemporer Penulis, dan, & Thamrin Ahmed Fernanda Desky Noer Chalifah Ramadhany Atma Ras Fritz Hotman S Damanik Oman Sukmana Zulkifli Abdullah Dimas Ario Sumilih Nurul Kamaliah Umasangaji, H. A. (2025). *SOSIOLOGI PENDIDIKAN*.
www.stardigitalpublishing.com
- Tintingon, J. Y., Lumapow, H. R., & Rotty, V. N. J. (2023). Problematika dan Perubahan Kebijakan Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(2), 798–809.
<https://doi.org/10.31949/educatio.v9i2.5088>
- Wijayanto, S., Purwandari, S., Widanarti, N. I., Magelang, M., Negeri, S. D., Sungapan, K., & Progo, I. (2025). Membongkar kurikulum tersembunyi: Studi Fenomenologis tentang Nilai Keadilan dan Bias Gender di Sekolah Dasar. *Borobudur Educational Review*, 5(2), 182–192. <https://doi.org/10.31603/bedr.14997>

PROFIL PENULIS




Edi Kuhen A.Md.IP, S.H., M.H.

Penulis adalah seorang praktisi di bidang pemasyarakatan sekaligus akademisi yang menaruh perhatian besar pada tata kelola dan manajemen pendidikan. Penulis mengawali pendidikan tinggi formalnya dengan menyelesaikan studi D3 Ilmu Pemasyarakatan di Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP) dan lulus pada tahun 2007. Guna memperkuat fondasi

keilmuannya di bidang hukum, penulis melanjutkan studi dan berhasil meraih gelar Sarjana Hukum (S1) dari Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang pada tahun 2011. Komitmennya dalam mendalami hukum tata negara dan pidana teoretis dibuktikan dengan menyelesaikannya studi Magister Hukum (S2) di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM pada tahun 2014.

Saat ini, penulis mengemban amanah birokrasi dan kedinasan sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIB Slawi. Di sela-sela kesibukan strukturalnya dalam memimpin institusi pemasyarakatan, penulis aktif melakukan kajian, riset, serta pengembangan inovasi manajemen pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan reorientasi pendidikan nonformal dan formal di lingkungan penegakan hukum. Melalui kombinasi pengalaman lapangan yang matang sebagai praktisi pemasyarakatan dan latar belakang keilmuan hukum yang kokoh, penulis berharap dapat terus memberikan kontribusi akademik yang signifikan bagi transformasi dan peningkatan kualitas sistem pendidikan serta rehabilitasi sosial di Indonesia.

Email Penulis : ekuhen40@students.unnes.ac.id



BAB 12
DINAMIKA DAN
KEBIJAKAN MUTU
PENDIDIKAN
TERHADAP DAYA SAING
BANGSA INDONESIA

Renza Maisetyo, AMd.IP., S.H., M.H.
Universitas Negeri Semarang



Pendahuluan

Dalam konteks global yang semakin kompetitif, kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penentu utama daya saing suatu bangsa. Pendidikan sebagai instrumen strategis dituntut tidak hanya menghasilkan lulusan terampil, tetapi juga relevan dengan perkembangan zaman, dunia industri, dan kebutuhan masyarakat. Konsep mutu pendidikan telah bergeser dari pencapaian nilai akademik semata menuju paradigma berkelanjutan yang berfokus pada outcome dan relevansi dengan dunia kerja. Rapor Pendidikan Indonesia 2023 mengindikasikan bahwa meski akses pendidikan meningkat, disparitas kualitas antar wilayah masih lebar dan kesenjangan kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja tetap menjadi isu kritis (Kemendikbudristek, 2023).

Kajian literatur terkini memperkuat urgensi menyelaraskan kebijakan mutu pendidikan dengan tujuan daya saing. Lee dan Lee (2021) menemukan bahwa sistem pendidikan negara-negara berdaya saing tinggi memiliki kebijakan mutu yang adaptif dan terintegrasi dengan ekosistem inovasi nasional. Smith et al. (2022) membuktikan pendekatan *Continuous Quality Improvement (CQI)* efektif mendorong perbaikan berkelanjutan. García dan Fernández (2023) menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan mutu sangat bergantung pada kapasitas dan kesejahteraan guru. Sementara Nurlia et al. (2024) mengidentifikasi bahwa fragmentasi kebijakan, keterbatasan infrastruktur, dan budaya kerja yang belum berorientasi mutu menjadi hambatan utama di Indonesia.

Mungkinkah kuncinya terletak pada peningkatan kompetensi guru yang lebih memanusiakan, atau pada digitalisasi yang kita harapkan memudahkan namun seringkali malah menambah beban, atau pada revitalisasi sarana prasarana yang menciptakan ruang belajar yang aman nyaman dan menginspirasi? Ketiganya mengharuskan kita pada satu visi yang sama: bagaimana merajut semua elemen ini menjadi sebuah budaya mutu yang berkelanjutan, yang tidak hanya mendongkrak daya saing lulusan di pasar global, tetapi juga membentuk mereka menjadi pribadi yang adaptif, kreatif, dan tetap berakar pada nilai-nilai kemanusiaan.

Pilar Peningkatan Mutu: Guru, Digitalisasi, dan Sarana Prasarana

Tiga landasan konseptual menopang strategi perbaikan mutu. Kerangka TPACK (*Technological Pedagogical Content Knowledge*) dari Mishra dan Koehler menegaskan perlunya perpaduan kompetensi materi, pedagogi, dan teknologi pada guru, yang harus diiringi kesejahteraan sesuai teori hierarki kebutuhan Maslow. Model SAMR (*Substitution, Augmentation, Modification, Redefinition*) dari Puentedura memberikan jenjang evaluasi digitalisasi idealnya bergerak dari menggantikan kertas menuju penciptaan pengalaman belajar baru yang sebelumnya tak terpikirkan. Konsep 'guru ketiga' (*the third teacher*) menegaskan bahwa sarana prasarana bukan sekadar bangunan fisik, melainkan ekosistem yang membentuk suasana belajar dan merangsang rasa ingin tahu.

Dalam analisis Potret Capaian Pendidikan Berdasarkan Rapor Pendidikan 2024/2025 *platform* Rapor Pendidikan berfungsi sebagai single source of truth yang mengintegrasikan data Asesmen Nasional (AN), Dapodik, dan survei lingkungan belajar, memungkinkan evaluasi multidimensi berbasis bukti. Data 2024/2025 menunjukkan peningkatan rata-rata nasional: skor literasi membaca naik 8,5 poin dan numerasi 7,2 poin dibandingkan periode sebelumnya, terkait intensifikasi pembelajaran pasca-AN dan Kurikulum Merdeka. Namun analisis mendalam mengungkap disparitas yang masih sangat signifikan:

1. Disparitas Geografis: Selisih skor literasi antara provinsi tertinggi (DIY, Bali) dan wilayah 3T mencapai 35 poin, dipengaruhi oleh ketimpangan akses bahan bacaan, kualifikasi guru, dan infrastruktur digital.
2. Disparitas Jenis Sekolah: Sekolah negeri menunjukkan tren peningkatan lebih konsisten; disparitas antara sekolah umum dan SMK dalam numerasi abstrak masih terlihat.
3. Level Kemahiran: Proporsi siswa pada level 'Cakap' dan 'Mahir' untuk numerasi masih di bawah 45%, mengindikasikan perbaikan rata-rata nasional terjadi di level menengah, sementara transformasi menuju level mahir memerlukan intervensi lebih khusus.

Daftar Pustaka

- Chen, & Wang. (2023). Integrasi teknologi dalam pembelajaran dan tata kelola sekolah.
- García, & Fernández. (2023). Kapasitas dan kesejahteraan guru dalam kebijakan mutu.
- Harvey, L., & Stensaker, B. (2008). Quality culture: Understandings, boundaries and linkages. *European Journal of Education*, 43(4), 427–442.
- Kemendikbudristek. (2023). Rapor Pendidikan Indonesia 2023. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Kemendikbudristek. (2024). Data Rapor Pendidikan 2024/2025: Asesmen Nasional, Dapodik, dan Survei Lingkungan Belajar. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Lee, J., & Lee, H. (2021). Education quality policy and national competitiveness: A comparative analysis.
- Leithwood, K., et al. (2004). How leadership influences *student learning*. University of Minnesota: Center for Applied Research and Educational Improvement.
- Mishra, P., & Koehler, M.J. Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK): A framework for teacher knowledge.
- Nurlia, et al. (2024). Tantangan implementasi kebijakan mutu pendidikan di Indonesia: Kajian tematik.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.
- Puentedura, R. SAMR: Substitution, Augmentation, Modification, Redefinition. Model untuk integrasi teknologi dalam pembelajaran.
- Schön, D.A. (1983). *The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action*. New York: Basic Books.
- Smith, et al. (2022). Pendekatan Continuous Quality Improvement (CQI) dalam tata kelola pendidikan: Bukti dan praktik.
- W. Edwards Deming. Siklus PDCA: Plan-Do-Check-Act sebagai kerangka perbaikan berkelanjutan.

PROFIL PENULIS



Renza Maisetyo, AMd.IP., S.H., M.H.

Penulis praktisi dan akademisi di bidang pemasyarakatan yang telah mengabdikan lebih dari 22 tahun pengalamannya sebagai petugas pemasyarakatan pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Dalam perjalanan kariernya, bertugas sebagai pembina warga binaan pemasyarakatan (WBP) di berbagai Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan), dengan fokus pada pembinaan kepribadian, pengembangan kemandirian, dan pembinaan kepribadian dan peningkatan kompetensi narapidana.. Penulis mulai karier dalam dunia pemasyarakatan sejak tahun 2005 pada Akademi Ilmu Pemasyarakatan melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sunan Giri Malang dan melanjutkan studi Pasca Sarjana program Studi yang sama pada Universitas Islam Malang dan berhasil menyelesaikan studi pada tahun 2014.

Penulis saat ini berkarier sebagai kepala unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jepara Berlatar belakang pendidikan di bidang pemasyarakatan dan ilmu hukum, saat ini memperdalam kajian akademisnya melalui program doktor Manajemen Pendidikan di Universitas Negeri Semarang (UNNES). Minat riset berpusat pada pengembangan kepemimpinan dan pemberdayaan warga binaan melalui program pendidikan yang terstruktur dan berkelanjutan. Dengan pengalaman tersebut, penulis berharap dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

Email Penulis: renza84@gmail.com

DINAMIKA — DAN — KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI INDONESIA

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun peradaban suatu bangsa. Di Indonesia, sistem pendidikan senantiasa mengalami dinamika yang menarik untuk dikaji, baik dari sisi historis, filosofis, maupun implementasi kebijakannya. Mulai dari perubahan kurikulum, peningkatan kualitas guru, pemerataan akses pendidikan, hingga tantangan transformasi digital, semuanya menjadi bagian dari mozaik besar pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Buku ini disusun dengan pendekatan multidisiplin, menggabungkan analisis kebijakan, praktik di lapangan, serta perspektif teoritis yang relevan. Penulis membagi ke dalam 12 (dua belas bab) sebagai berikut:

1. Otonomi dan Desentralisasi Pendidikan: Kajian Konseptual, Regulasi, dan Implementasi di Indonesia
2. Kebijakan Peningkatan Mutu Pendidikan
3. Baseline Assessment Kualitas Pembelajaran Mendalam di SMA MODEL PM & KKA Sebagai Fondasi Transformasi Pendidikan Berbasis Data di Era Ai
4. Implementasi Kebijakan Pendidikan Dasar di Indonesia
5. Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Dari Orde Lama Hingga Era Reformasi dan Implikasinya Terhadap Manajemen Pendidikan
6. Arsitektur Kognitif Baru: Menginstitusikan Koding dan Kecerdasan Artifisial Sebagai Episentrum Budaya Prestasi di Pendidikan Menengah
7. Pendidikan Vokasi dan Revitalisasi SMK: Transformasi Sistem Pendidikan Kejuruan Menuju Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing
8. Pendidikan Formal dan Nonformal: Kesetaraan Akses dan Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Pilar Transformasi Sosial
9. Peran Dosen Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Mahasiswa di Era Transformasi Pendidikan Tinggi
10. Kritik Kebijakan Pendidikan Tinggi: Krisis Struktural Dan Strategi Transformasi Menuju Indonesia Emas 2045
11. Evaluasi Kebijakan Pendidikan Ramah Anak, Kesetaraan Gender, dan Inklusi Disabilitas Dalam Perspektif Pierre Bourdieu: Antara Idealitas Kebijakan dan Realitas Habitus Institusional
12. Dinamika dan Kebijakan Mutu Pendidikan Terhadap Daya Saing Bangsa Indonesia